

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA
FRAUD PADA PERGURUAN TINGGI DI LAMPUNG**

Oleh

ALVIS OKTANZA FAYARDI

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU AKUNTANSI**

pada

**Program Studi Magister Ilmu Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA *FRAUD* PADA PERGURUAN TINGGI DI LAMPUNG

Oleh

ALVIS OKTANZA FAYARDI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh enam faktor dalam teori *Hexagon Fraud*—yaitu tekanan, kapabilitas, kolusi, kesempatan, rasionalisasi, dan egoisme—terhadap terjadinya *fraud* di perguruan tinggi di Provinsi Lampung. Penelitian dilakukan pada perguruan tinggi negeri dan swasta yang telah berstatus universitas dan memiliki akreditasi minimal B. Pemilihan sampel dilakukan dengan *teknik purposive sampling*, dan menghasilkan 171 responden dari 11 universitas yang memenuhi kriteria.

Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner berskala *Likert*. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi tekanan, kapabilitas, kolusi, kesempatan, rasionalisasi, dan egoisme, sementara variabel dependen adalah *fraud*. Analisis data dilakukan secara kuantitatif menggunakan metode *Structural Equation Modeling* berbasis *Partial Least Squares* (SEM-PLS), dengan bantuan perangkat lunak *SmartPLS*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolusi, kesempatan, dan rasionalisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap terjadinya *fraud*. Sebaliknya, tekanan, kapabilitas, dan egoisme tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa terjadinya *fraud* di perguruan tinggi lebih dipengaruhi oleh kelemahan sistem pengawasan dan justifikasi moral, dibandingkan dengan faktor karakteristik individu. Oleh karena itu, upaya pencegahan *fraud* perlu difokuskan pada penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan transparansi tata kelola, serta pembangunan budaya organisasi yang menjunjung nilai integritas.

Kata kunci: *hexagon fraud*, *fraud*, tekanan, kapabilitas, kolusi, kesempatan, rasionalisasi, dan egoisme

ABSTRACT**ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE OCCURRENCE OF FRAUD
IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN LAMPUNG****By****ALVIS OKTANZA FAYARDI**

This study aims to analyze the influence of six factors in the Hexagon Fraud theory—namely pressure, capability, collusion, opportunity, rationalization, and egoism—on the occurrence of fraud in higher education institutions in Lampung Province. The research was conducted at public and private universities that have obtained university status and hold a minimum accreditation of grade B. The sample was selected using purposive sampling, resulting in 171 respondents from 11 eligible universities.

The data used in this study are primary data collected through the distribution of Likert-scale questionnaires. The independent variables in this study consist of pressure, capability, collusion, opportunity, rationalization, and egoism, while the dependent variable is fraud. The data were analyzed quantitatively using Structural Equation Modeling with the Partial Least Squares (SEM-PLS) method, assisted by the SmartPLS software.

The results show that collusion, opportunity, and rationalization have a positive and significant effect on the occurrence of fraud. In contrast, pressure, capability, and egoism do not show a significant effect. These findings indicate that fraud in higher education institutions is more influenced by weaknesses in oversight systems and moral justification, rather than individual characteristics. Therefore, efforts to prevent fraud should focus on strengthening internal control systems, enhancing governance transparency, and fostering an organizational culture rooted in integrity.

Keywords: *hexagon fraud, fraud, pressure, capability, collusion, opportunity, rationalization, egoism*

Judul Tesis : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI TERJADINYA FRAUD
PADA PERGURUAN TINGGI DI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **ALVIS OKTANZA FAYARDI**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2321031035

Program Studi : Magister Ilmu Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Ak. Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Ak., CA.

NIP 19750620 200012 2 001

NIP 19740312 200112 1 003

Ketua Program Magister Ilmu Akuntansi

Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Ak.

NIP 19750620 200012 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Ak.**

Sekretaris

: **Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Ak., CA.**

Penguji Utama

: **Dr. Sudrajat, S.E., M.Ace., Akt., CA.**

Sekretaris Penguji : **Niruk Dewi Kesumaningrum, S.E., M.Sc., Ph.D.**

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.

NIP 19660621 199003 1 003

3. Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.

NIP 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: **27 Mei 2025**

LEMBAR PENYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul:

“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya *Fraud* pada Perguruan Tinggi di Lampung” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.

2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini saya serahkan sepenuhnya kepada pihak Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibatnya dan sanksi yang akan diberikan dan dituntut seduai hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 3 Juni 2025
Pembuat Pernyataan,



Alvis Oktanza Fayardi
NPM 2321031035

RIWAYAT HIDUP

Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, lahir di Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pada tanggal 19 Oktober 1990, dari pasangan Drs. Yarmaidi, M.Si. dan Dra. Fauziah Aryati, M.Si. Pendidikan dasar diselesaikan di SD Kartika Jaya II-5 Bandar Lampung pada tahun 2003, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 2 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2005. Pendidikan menengah atas ditempuh di SMA Negeri 2 Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2008.

Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan studi jenjang sarjana pada Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2012. Setelah lulus, penulis bekerja di Bank Muamalat sejak tahun 2012 hingga tahun 2017. Pada tahun 2018, penulis diterima bekerja sebagai tenaga kependidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Pada tahun 2023, penulis memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Akuntansi di fakultas yang sama.

MOTTO

“Bukan besar langkahnya yang menentukan, tapi keberanian untuk memulainya.”

PERSEMBAHAN

DENGAN MENGUCAP SYUKUR KEPADA ALLAH SWT. SERTA
KERENDAHAN HATI, KUPERSEMBAHKAN TESIS INI UNTUK KEDUA
ORANG TUA KU, PAPA DAN MAMA, UNTUK AYAH DAN IBU
METUAKU, ISTRIKU, KEDUA ANAKKU TERSAYANG, KAKAK DAN
ADIKKU, SAHABAT-SABAHAT YANG TELAH MEMBANTU
MENYELESAIKAN TESIS INI, SERTA ALMAMATER TERCINTA.

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Tesis yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya *Fraud* pada Perguruan Tinggi di Lampung” disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Akuntansi pada Program Pascasarjana Ilmu Akuntansi Universitas Lampung. Penyusunan dan penyelesaian tesis ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan Pembimbing Utama, yang telah memberikan dukungan, arahan, saran, dan waktu yang sangat berharga selama proses penyusunan tesis ini.
3. Bapak Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku pembimbing, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, kritik, serta semangat dan dukungan dalam penyelesaian tesis ini.
4. Bapak Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt., CA., selaku penguji utama, atas kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini.
5. Ibu Ninuk Dewi Kesumaningrum, S.E., M.Sc., Ph.D. selaku sekretaris penguji, atas masukan dan saran yang sangat bermanfaat dalam penyempurnaan tesis ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengalaman berharga selama proses perkuliahan.

7. Seluruh tenaga kependidikan, khususnya Mbak Tina, Mas Nanang, Mas Veri, dan Mas Ardi, yang telah banyak membantu selama proses perkuliahan hingga kelulusan.
8. Papa dan Mama yang selalu mendoakan, memberikan semangat, teladan, dan dukungan penuh dalam segala bentuk, sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
9. Ayah dan Ibu mertua yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan bantuan yang sangat berarti selama proses penulisan tesis ini.
10. Istriku tercinta, yang tak henti-hentinya memberikan semangat, doa, dan bantuan, serta menjadi sumber kekuatan selama proses penyusunan tesis ini.
11. Kedua putraku, Alden Syathir Fayardi dan Alzaidan Syakir Fayardi, yang menjadi motivasi dan inspirasi terbesar dalam meraih pencapaian ini.
12. Kakak dan adik tersayang atas semangat dan dukungan yang diberikan selama proses penyusunan tesis ini.
13. Rekan-rekan, khususnya Saudara Fadeli, yang telah meluangkan waktu untuk membantu menjawab pertanyaan serta mendukung penyelesaian tesis ini.
14. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Magister Ilmu Akuntansi, yang telah bersama-sama berjuang dalam menempuh studi dan menyelesaikan tesis.
15. Seluruh keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, khususnya Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., yang telah memberikan izin, semangat, dan dukungan selama ini.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan doa dalam proses penyelesaian tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki kekurangan dan belum sempurna. Namun demikian, penulis berharap karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat sebagai referensi dan informasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Bandar Lampung, 3 Juni 2025
Penulis,

Alvis Oktanza Fayardi

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PENYATAAN	vi
RIWAYAT	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
 I. PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	14
1.3. Tujuan Penelitian	15
1.4. Kegunaan Penelitian	16
 II. LANDASAN TEORI	 18
2.1. Landasan Teori.....	18
2.1.1. Teori Atribusi	18
2.1.2. <i>Fraud</i>	19
2.1.3. <i>Hexagon Fraud</i>	19
2.1.3.1. Tekanan	20
2.1.3.2. Kapabilitas	21
2.1.3.3. Kolusi	22
2.1.3.4. Kesempatan	23
2.1.3.5. Rasionalisasi	24
2.1.3.6. Egoisme	25
2.2. Penelitian Terdahulu	26
2.3. Hipotesis	29
2.3.1. Pengaruh Tekanan terhadap <i>Fraud</i>	29

2.3.2. Pengaruh Kapabilitas terhadap <i>Fraud</i>	30
2.3.3. Pengaruh Kolusi terhadap <i>Fraud</i>	32
2.3.4. Pengaruh Kesempatan terhadap <i>Fraud</i>	33
2.3.5. Pengaruh Rasionalisasi terhadap <i>Fraud</i>	35
2.3.6. Pengaruh Egoisme terhadap <i>Fraud</i>	36
2.4. Kerangka Penelitian	37
III. METODE PENELITIAN	38
3.1. Jenis Penelitian	38
3.2. Populasi dan Sampel	38
3.3. Jenis dan Sumber Data	39
3.4. Variabel Penelitian	41
3.4.1. Variabel Dependen	41
3.4.2. Variabel Independen	42
3.4.2.1. Tekanan	42
3.4.2.2. Kapabilitas	43
3.4.2.3. Kolusi	44
3.4.2.4. Kesempatan	44
3.4.2.5. Rasionalisasi	46
3.4.2.6. Egoisme	47
3.5. Analisis Data	50
3.5.1. Analisis Outer Model	50
3.5.1.1. Uji Validitas	50
3.5.1.2. Uji Reliabilitas	51
3.5.2. Pengukuran Model Struktural	52
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	54
4.1. Hasil Penelitian	54
4.1.1. Proses Penyebaran Kuisisioner	54
4.1.2. Analisis Deskriptif	55
4.1.2.1. Deskriptif Karakteristik Responden	55
4.1.2.2. Deskriptif Variabel Penelitian	58
4.1.2.2.1. <i>Fraud</i>	58
4.1.2.2.2. Tekanan	61
4.1.2.2.3. Kapabilitas	63
4.1.2.2.4. Kolusi	64
4.1.2.2.5. Kesempatan	66
4.1.2.2.6. Rasionalisasi	69
4.1.2.2.7. Egoisme	72
4.1.3. Analisis Outer Model	74
4.1.3.1. Uji Validitas	75

4.1.3.1.1. <i>Outer Loadings</i>	75
4.1.3.1.2. <i>Average Variance Extracted (AVE)</i>	77
4.1.3.2. Uji Reliabilitas	78
4.1.3.2.1. <i>Composite Reliability</i> dan <i>Cronchbach Alpha</i>	79
4.1.3.2.2. Uji Validitas Diskriminan	80
4.1.4. Analisis Model Struktural	81
4.1.4.1. Uji Kolinieritas	83
4.1.4.2. Uji Determinasi Koefisien	84
4.1.4.3. Uji Hipotesis	85
4.1.4.3.1. Pengaruh tekanan terhadap terjadinya <i>fraud</i> pada perguruan tinggi di Lampung	85
4.1.4.3.2. Pengaruh kapabilitas terhadap terjadinya <i>fraud</i> pada perguruan tinggi di Lampung ..	87
4.1.4.3.3. Pengaruh kolusi terhadap terjadinya <i>fraud</i> pada perguruan tinggi di Lampung	88
4.1.4.3.4. Pengaruh kesempatan terhadap terjadinya <i>fraud</i> pada perguruan tinggi di Lampung ..	89
4.1.4.3.5. Pengaruh rasionalisasi terhadap terjadinya <i>fraud</i> pada perguruan tinggi di Lampung ..	91
4.1.4.3.6. Pengaruh egoisme terhadap terjadinya <i>fraud</i> pada perguruan tinggi di Lampung	92
4.2. Pembahasan	93
BAB V KESIMPULAN	98
5.1. Kesimpulan	98
5.2. Keterbatasan Penelitian	100
5.3. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	110

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Kasus Korupsi di Perguruan Tinggi	3
2. Penelitian Terdahulu	27
3. Pemilihan Sampel Penelitian	39
4. Dimensi dan Indikator variabel <i>Fraud</i>	41
5. Dimensi dan Indikator variabel Tekanan	42
6. Dimensi dan Indikator variabel Kapabilitas	43
7. Dimensi dan Indikator variabel Kolusi	44
8. Dimensi dan Indikator variabel Kesempatan	45
9. Dimensi dan Indikator variabel Rasionalisasi	46
10. Dimensi dan Indikator variabel Egoisme	47
11. Definisi Operasional Variabel	48
12. Deskriptif Karakteristik Responden	56
13. Deskriptif Variabel <i>Fraud</i>	58
14. Deskriptif Variabel Tekanan	61
15. Deskriptif Variabel Kapabilitas	63
16. Deskriptif Variabel Kolusi	65
17. Deskriptif Variabel Kesempatan	67
18. Deskriptif Variabel Rasionalisasi	69
19. Deskriptif Variabel Egoisme	72
20. Nilai <i>Outer Loadings</i>	75

21. Nilai <i>Average Variance Extracted</i> (AVE)	78
22. Nilai <i>Composite Reliability</i> dan <i>Cronbach Alpha</i>	79
23. Hasil Uji Validitas Diskriminan	80
24. Hasil Uji Kolinieritas	83
25. Hasil Uji Determinasi Koefisien	84
26. Hasil Uji Hipotesis	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Besaran Alokasi APBN Kemdikbudristek	7
2. Kerangka Penelitian	37
3. <i>Outer Model</i>	82

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Kuisisioner	111
2. Tabel 2. Karakteristik Responden	116
3. Tabel 3. <i>Outer Loading</i>	117
4. Tabel 4. <i>Construct Reliability and Validity</i>	118
5. Tabel 5. <i>Fornell-Larcker Criterion</i>	118
6. Tabel 6. <i>Inner VIF Values</i>	118
7. Tabel 7. <i>Path Coefficients</i>	119
8. Gambar 1. Kuisisioner Penelitian	120
9. Gambar 2. <i>Outer Model</i>	136

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan kasus *fraud* di Indonesia menunjukkan tren yang semakin mengkhawatirkan, baik dari segi jumlah kasus maupun besarnya kerugian yang ditimbulkan terhadap keuangan negara. *Fraud* tidak hanya terbatas pada tindakan korupsi, tetapi juga mencakup berbagai bentuk penyimpangan lainnya seperti penyalahgunaan wewenang, penggelapan aset, pemalsuan dokumen, dan manipulasi data yang dilakukan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Berdasarkan laporan Indonesia *Corruption Watch* (ICW), sepanjang tahun 2022 tercatat lebih dari 500 kasus korupsi yang ditindak oleh aparat penegak hukum, dengan nilai kerugian negara mencapai triliunan rupiah (ICW, 2022). Kasus-kasus ini tersebar di berbagai sektor, seperti pemerintahan, keuangan, kesehatan, pendidikan, hingga sektor swasta.

Secara global, *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) dalam laporan *Report to the Nations 2022* juga menegaskan bahwa *fraud* merupakan ancaman besar bagi berbagai jenis organisasi. Tiga bentuk *fraud* yang paling umum ditemukan adalah penyalahgunaan aset, korupsi, dan manipulasi laporan keuangan. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa *fraud* sering kali berlangsung lama tanpa terdeteksi, bahkan bisa mencapai hitungan bulan atau tahun, yang akhirnya menimbulkan kerugian besar bagi organisasi (ACFE, 2022). Di Indonesia sendiri, hampir semua sektor tidak luput dari praktik *fraud*. Sektor pemerintahan, baik pusat maupun daerah, menjadi penyumbang kasus terbanyak, khususnya dalam korupsi pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan anggaran, serta praktik suap dalam proses perizinan dan proyek infrastruktur (ICW, 2022). Selama masa pandemi COVID-19, sektor kesehatan juga mengalami peningkatan

kasus *fraud*, seperti dalam pengadaan alat kesehatan, distribusi vaksin, hingga penyaluran bantuan sosial. Di sektor keuangan, *fraud* biasanya terjadi melalui manipulasi laporan keuangan, penggelapan dana, serta investasi ilegal yang merugikan masyarakat secara luas.

Sektor pendidikan, yang seharusnya menjadi landasan utama dalam membentuk moral dan kecerdasan bangsa, ternyata juga rentan terhadap berbagai bentuk *fraud*. Di sektor ini, praktik *fraud* biasanya berkaitan dengan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), gratifikasi dalam proses penerimaan mahasiswa baru, penggelembungan anggaran untuk kegiatan penelitian, hingga manipulasi laporan keuangan institusi pendidikan tinggi. Secara khusus, *fraud* di perguruan tinggi cenderung lebih rumit dan sulit terdeteksi karena melibatkan individu yang paham terhadap sistem internal serta celah-celah kelemahan di dalamnya. Beberapa kasus bahkan ditemukan di laporan media dan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), seperti penyimpangan dana hibah, pelaksanaan kegiatan fiktif, dan pemotongan honorarium dosen. Menurut ACFE Indonesia Chapter (2023), sektor pendidikan digolongkan sebagai salah satu sektor dengan tingkat risiko *fraud* yang tinggi, disebabkan oleh lemahnya sistem pengawasan internal, budaya organisasi yang permisif terhadap pelanggaran, serta minimnya sistem pelaporan yang akuntabel dan transparan.

Sektor pendidikan tinggi di Indonesia tidak luput dari potensi praktik *fraud* yang kompleks dan sulit terdeteksi. *Fraud* di perguruan tinggi dapat mencakup berbagai bentuk seperti penyalahgunaan dana hibah, kegiatan fiktif, manipulasi laporan keuangan, hingga gratifikasi dalam proses penerimaan mahasiswa. Fenomena ini tidak hanya mengganggu stabilitas keuangan institusi, tetapi juga merusak integritas akademik yang menjadi fondasi kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan. Laporan dari Indonesia *Corruption Watch* (ICW) menyebutkan bahwa dalam periode 2015–2019, terdapat setidaknya 20 kasus korupsi yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi, dengan kerugian negara mencapai Rp 81,9 miliar (Ramadhana et al., 2020). Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa sektor ini membutuhkan perhatian serius dalam konteks pencegahan *fraud*.

Tabel 1. Daftar Kasus Korupsi di Perguruan Tinggi

No	Perguruan Tinggi	Kasus
1.	Universitas Bandung	Mantan Rektor Universitas Bandung (UB) berinisial BR ditetapkan sebagai tersangka karena diduga telah melakukan tindak pidana korupsi yang mencapai miliaran rupiah dari dana Program Indonesia Pintar (PIP) kuliah.
2.	Universitas Airlangga	Mantan rektor terlibat dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa, dengan kerugian negara sekitar Rp 85 miliar
3.	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim	Akhmad Mujahidin dijatuhi hukuman penjara karena kolusi dalam pengadaan jaringan internet kampus
4.	Universitas Mitra Karya	Rektor dan mantan rektor ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana Program Indonesia Pintar (PIP), dengan kerugian negara mencapai Rp 13 miliar
5.	Universitas Lampung	Rektor Unila ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK pada Agustus 2022 terkait dugaan suap dalam penerimaan mahasiswa baru. Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 105 miliar
6.	Universitas Nahdlatul Ulama	Mantan Wakil Rektor Bidang Akademik UNU diduga melakukan tindakan pidana korupsi. Modusnya melakukan pemotongan biaya hidup mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada Tahun Akademik 2020.

Sumber: data diolah (2025)

Kasus-kasus di atas mencerminkan masalah mendasar dalam sistem pengawasan dan akuntabilitas di sektor pendidikan tinggi, yang rentan disalahgunakan oleh individu-individu yang memiliki otoritas. Fenomena ini tidak hanya merusak citra lembaga pendidikan sebagai pusat pembentukan nilai moral dan akademis, tetapi juga merugikan keuangan negara secara signifikan. Transparansi dan pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk mencegah praktik-praktik semacam ini agar

pendidikan tinggi dapat kembali menjalankan perannya sebagai agen perubahan sosial dan pembangunan karakter bangsa.

Perguruan tinggi di Provinsi Lampung juga memerlukan perhatian khusus karena daerah ini sedang berkembang dalam sektor pendidikan tinggi, ditandai dengan peningkatan jumlah institusi dan pertumbuhan sumber daya manusia di bidang akademik. Namun, beberapa temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung mengindikasikan adanya kelemahan dalam pengelolaan anggaran dan sistem pengendalian internal di sejumlah perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Kelemahan tersebut menciptakan peluang terjadinya *fraud*, sebagaimana dijelaskan dalam teori *triangle fraud*, yang menyatakan bahwa *fraud* terjadi karena adanya tekanan, peluang, dan rasionalisasi; di mana peluang sering kali muncul ketika sistem pengawasan tidak berjalan optimal oleh (Cressey, 1953). Kasus terbaru yang menyoroti permasalahan ini adalah kasus suap dalam penerimaan mahasiswa baru di Universitas Lampung (Unila). Mantan Rektor Unila terbukti menerima suap sebesar Rp6,9 miliar terkait penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri. Pada Mei 2023, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Mantan Rektor Unila atas tindakannya tersebut (Saputra, 2023). Kasus ini mencerminkan adanya celah dalam sistem pengawasan internal perguruan tinggi yang dapat dimanfaatkan untuk tindakan koruptif.

Lebih lanjut, penerapan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) di perguruan tinggi di luar Pulau Jawa, termasuk Lampung, masih menghadapi tantangan serius. Berdasarkan hasil pengawasan dari Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek, institusi di daerah-daerah ini masih belum sepenuhnya mampu menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya. Situasi ini memperkuat pentingnya penelitian di wilayah tersebut. Dari data Tren Penindakan kasus Korupsi Pendidikan 2015 – 2019 (Ramadhana, et al., 2020), juga terlihat pola – pola korupsi pada perguruan tinggi, yaitu:

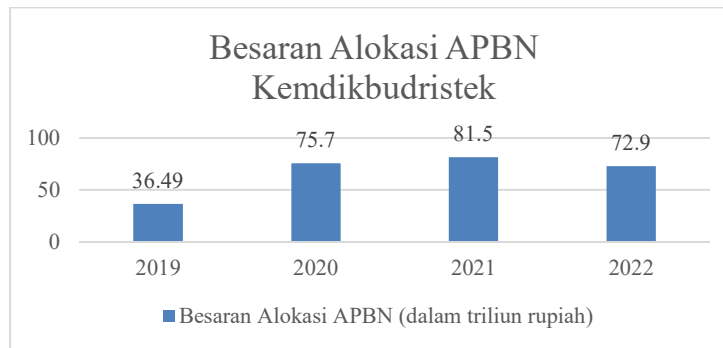
1. Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa
Korupsi pengadaan barang dan jasa di perguruan tinggi dapat berupa pengadaan terkait barang dan pembangunan infrastruktur. Untuk korupsi yang terkait dengan pengadaan barang, diantaranya, kasus dugaan korupsi pengadaan meubelair Rusunawa IAIN Pontianak dengan modus laporan fiktif. Berikutnya dugaan korupsi pengadaan alat laboratorium di Universitas Bangka Belitung tahun 2011 dan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan (FKIP) Universitas Khairun Ternate, yang masing - masing menggunakan modus penggelembungan harga dan penyalahgunaan anggaran.
2. Korupsi dana hibah atau CSR
Salah satu contoh kasusnya adalah dugaan korupsi Dana Program Hibah Pembinaan STIKOM Tanjungpinang dan Dugaan Korupsi Dana Hibah Yayasan Meranti Bangkit yang masing - masing menggunakan modus penyalahgunaan anggaran dan penggelembungan harga.
3. Korupsi dana penelitian
Dana penelitian pun di korupsi. salah satu contohnya adalah dugaan korupsi Dana Penelitian Universitas Tadulako (Untad) tahun 2014 dan 2015 dengan modus penyalahgunaan anggaran.
4. Korupsi anggaran internal perguruan tinggi
Dalam kesehariannya melakukan pengelolaan keuangan perguruan (menerima, membayar dan mengelola uang kuliah) juga rentan terhadap korupsi. Salah satu contohnya, korupsi penerimaan, pembayaran, dan pengelolaan uang kuliah mahasiswa Program Magister Manajemen (MM) Universitas Sumatera Utara (USU) dengan modus penggelapan.
5. Korupsi dana “sumbangan” pendidikan
Salah satu contoh kasusnya adalah dugaan korupsi dana Ikatan Orang Tua Mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua, Bali dengan modus penyalahgunaan wewenang.

Selain ke-5 pola korupsi tersebut, masih banyak bentuk-bentuk korupsi yang terjadi di perguruan tinggi, yaitu suap untuk mendapatkan nilai, korupsi dana

beasiswa, suap untuk mendapatkan akreditasi, dan korupsi dalam pemilihan pejabat di internal perguruan tinggi. Aktor yang terlibat dalam korupsi di perguruan tinggi juga beragam. Ada yang berasal dari internal perguruan tinggi seperti dosen dan wakil rektor, dan berasal dari eksternal seperti pihak swasta dan pejabat/ staf kementerian terkait.

Korupsi dapat terjadi dalam beberapa situasi, yaitu ketika tindakan tersebut menguntungkan individu atau kelompok, adanya kesempatan untuk melakukannya karena memiliki wewenang yang tidak diawasi secara ketat, serta minimnya risiko perbuatan tersebut terungkap akibat rendahnya tingkat akuntabilitas. Klitgaard (1996) juga mengemukakan hal serupa, bahwa korupsi dapat muncul ketika terdapat monopoli kekuasaan, ditambah dengan adanya diskresi dan rendahnya akuntabilitas. Menurut Klitgaard, baik di sektor swasta maupun pemerintah, ketika suatu organisasi atau individu memiliki monopoli atas barang atau layanan, memiliki wewenang untuk menentukan siapa yang mendapatkannya serta seberapa besar yang diberikan, dan hal tersebut tidak diawasi dengan baik, maka potensi korupsi menjadi sangat tinggi.

Gambar 1 menunjukkan bahwa Alokasi APBN untuk pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) hampir selalu naik setiap tahunnya. Besaran alokasi APBN Kemdikbudristek pada tahun 2019 sekitar 36,49 triliun rupiah. Kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 75,7 triliun rupiah dan naik lagi pada tahun 2021 menjadi 81,5 triliun rupiah. Lalu mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022 menjadi 72,9 triliun rupiah. Akan tetapi, situs resmi Kemdikbudristek tidak menuliskan besaran anggaran dalam laporan kinerjanya, hanya ada angka capaian dan target dari program mereka. ICW mencatat bahwa besar anggaran yang dikelola tidak sejalan dengan transparansi yang dilakukan oleh Kemdikbudristek. Hal ini tentu menjadi peluang bagi pelaku *fraud* untuk melakukan tindakan *fraud*.



Sumber: Indonesia *Corruption Watch*, 2021 (data diolah)

Gambar 1. Besaran Alokasi APBN Kemdikbudristek

Tata kelola penganggaran di sektor pendidikan masih belum optimal, baik dari tingkat pusat hingga sekolah dan perguruan tinggi, minim partisipasi publik. Partisipasi pemangku kepentingan dalam proses penyusunan program, penganggaran, dan pengelolaan dana pendidikan belum diatur secara signifikan dalam kebijakan dan regulasi sektor pendidikan. Program pendidikan pemerintah pusat cenderung bergantung pada usulan kebutuhan dari dinas pendidikan daerah serta data statistik dari Badan Pusat Statistik dan Bank Dunia. Kondisi ini menjadi pertimbangan penting bagi institusi pendidikan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindakan *fraud* yang dapat merugikan mereka.

Teori atribusi dapat digunakan untuk memahami fenomena *fraud* yang terjadi di perguruan tinggi melalui cara individu atau kelompok menilai penyebab dari perilaku *fraud* tersebut. Teori atribusi, yang dikembangkan oleh Heider (1958) dan kemudian diperluas oleh Kelley (1973) dan Weiner (1986), menjelaskan bagaimana orang membuat penilaian tentang penyebab suatu peristiwa, apakah itu disebabkan oleh faktor internal (disposisi) atau eksternal (situasional). Atribusi internal, khususnya di perguruan tinggi, mengacu pada keyakinan bahwa tindakan *fraud* disebabkan oleh sifat-sifat pribadi pelaku, seperti moralitas yang rendah, ketamakan, atau ambisi pribadi yang berlebihan. Misalnya, seseorang yang melakukan penyalahgunaan aset atau memalsukan laporan keuangan mungkin dinilai melakukannya karena sifat rakus atau karena memiliki kecenderungan untuk mengambil risiko secara tidak etis. Atribusi eksternal menyatakan bahwa

fraud terjadi bukan karena sifat pribadi pelaku, melainkan karena tekanan atau kondisi eksternal yang memaksa seseorang melakukan tindakan tersebut. Di perguruan tinggi, *fraud* bisa saja terjadi karena tekanan dari luar, seperti anggaran yang terbatas, tekanan untuk mencapai target kinerja yang tinggi, atau sistem pengendalian internal yang lemah.

Dalam konteks *fraud*, pelaku atau pengamat *fraud* di perguruan tinggi dapat terjebak dalam *self-serving bias*, yaitu kecenderungan untuk mengatribusi kesuksesan pada faktor internal dan kegagalan pada faktor eksternal. Misalnya, jika seorang pejabat perguruan tinggi berhasil meningkatkan kinerja keuangan, mereka mungkin mengatribusi keberhasilan tersebut pada kemampuan pribadi mereka. Namun, jika terdapat tindakan *fraud*, mereka cenderung menyalahkan kondisi eksternal seperti kurangnya anggaran atau tekanan dari pemerintah. Pemahaman tentang atribusi dalam fenomena *fraud* dapat membantu dalam strategi pencegahan. Misalnya, jika *fraud* lebih sering dikaitkan dengan tekanan eksternal, perguruan tinggi dapat memperbaiki tata kelola dan mengurangi tekanan yang dapat memicu tindakan tersebut. Namun, jika *fraud* dipandang sebagai akibat dari disposisi personal, maka institusi harus meningkatkan pemantauan terhadap karyawan dan menegakkan kode etik yang ketat.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji isu *fraud* yang terjadi di Perguruan Tinggi. *Fraud* yang paling sering terjadi di perguruan tinggi adalah *fraud* akademik, seperti favoritisme, dibandingkan dengan jenis *fraud* lainnya, seperti *fraud* administrasi maupun *fraud* keuangan. (Julian & Bonavia, 2020). Selain itu, *fraud* dalam prosedur dan ketentuan akreditasi juga mungkin terjadi. (Souza-Daw & Ross, 2021). Melalui kajian literatur yang dilakukan di Rusia, *fraud* di perguruan tinggi menjadi permasalahan yang kompleks yang dapat dilihat dari frekuensi terjadinya kasus tersebut, pihak-pihak yang terlibat, dan kurangnya integritas kalangan akademika (Denisova-Schmidt, 2023). Hal serupa terjadi di Asia Timur dan Tenggara, di mana kasus *fraud* menjadi sangat kompleks akibat dari buruknya transparansi hubungan antara *fraud* dan tata kelola di wilayah tersebut (Welch, 2020). Hasil studi literatur menunjukkan bahwa *fraud* yang

terjadi di perguruan tinggi didorong oleh faktor-faktor seperti tekanan, peluang, rasionalisasi, kompetensi, dan egoisme yang juga dimoderasi oleh nilai-nilai etika yang dipegang (Harapap & Isgiyarta, 2023).

Fraud adalah istilah yang umum digunakan di kalangan auditor, investor, akuntan, dan masyarakat yang berkecimpung dalam bidang ekonomi dan akuntansi. *Fraud* merupakan tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pribadi atau kelompoknya, seperti memanipulasi laporan keuangan demi tujuan tertentu (*Association of Certified Fraud Examiners* 2000). *Fraud* dapat dilakukan oleh individu baik dari dalam maupun luar organisasi demi memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dan menyebabkan kerugian pihak lain secara langsung maupun tidak langsung. Cressey (1953) menyajikan *Triangle Fraud*, yang menyatakan bahwa tiga komponen, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi, adalah dasar terjadinya *fraud* dan bertanggung jawab atas motivasi seseorang untuk melakukan *fraud*. Akhirnya, teori ini berkembang menjadi model *Diamond Fraud*, yang mengusulkan tekanan, kemampuan, kesempatan, dan rasionalisasi sebagai alasan untuk *fraud* (Wolfe & Hermanson, 2004). Selain itu, Marks (2009) mengembangkan kembali model *fraud* berlian menjadi *Pentagon Fraud* dengan menambahkan egoisme sebagai elemen baru dalam memicu *fraud*. Teori *Hexagon Fraud* lahir sebagai teori yang dapat diperbarui dalam mendeteksi pemicu *fraud*. Teori ini dikembangkan dengan menambahkan elemen baru, kolusi, sebagai pemicu *fraud* (Vousinas, 2019). Elemen kolusi ditambahkan berdasarkan kasus penipuan besar seperti Enron, Parmalat, dan Worldcom, yang menunjukkan bahwa kolusi adalah inti dari penipuan dan kejahatan keuangan.

Tekanan, baik finansial maupun non-finansial, dapat menjadi faktor signifikan dalam terjadinya *fraud* di perguruan tinggi, termasuk korupsi, penyalahgunaan aset, dan manipulasi laporan keuangan. Menurut teori atribusi, individu cenderung mengaitkan perilaku mereka dengan faktor eksternal atau internal. Dalam konteks *fraud*, tekanan finansial seperti kebutuhan mendesak untuk memenuhi target pendapatan atau ketidakstabilan anggaran dapat mendorong individu untuk

mengambil tindakan tidak etis, seperti memanipulasi laporan keuangan guna mencapai hasil yang diharapkan (Albrecht et al., 2011). Di sisi lain, tekanan non-finansial, seperti tuntutan dari pimpinan atau tekanan lingkungan kerja yang kompetitif, juga bisa memicu terjadinya *fraud* sebagai cara untuk mempertahankan posisi atau reputasi. Andayani et al. (2020) dalam penelitian mereka tentang korupsi di sektor pendidikan menunjukkan bahwa tekanan politik dan sosial yang datang dari pihak pemangku kepentingan dapat memaksa institusi pendidikan tinggi untuk melakukan penyalahgunaan aset dan anggaran. Albrecht et al. (2014) dalam studi mereka juga mengidentifikasi bahwa tekanan untuk mempertahankan citra atau reputasi institusi sering kali menyebabkan *fraud* dalam pelaporan keuangan. Perguruan tinggi merasa terdorong untuk menunjukkan performa yang baik, meskipun dalam kenyataannya mereka menghadapi kesulitan finansial.

Kapabilitas individu atau kelompok dalam suatu organisasi, termasuk perguruan tinggi, dapat menjadi faktor yang memungkinkan terjadinya *fraud*. Dalam konteks teori atribusi, perilaku ini dapat dijelaskan melalui pemahaman tentang bagaimana individu menilai kemampuan dan peluang mereka untuk melakukan tindakan *fraud* tanpa terdeteksi atau dengan risiko yang rendah. Seorang individu yang memiliki kapabilitas tinggi (pengetahuan, akses, dan kontrol) dapat mengatribusi perilaku curang mereka sebagai sesuatu yang dapat dibenarkan atau dimungkinkan karena mereka memiliki kesempatan dan keterampilan untuk melakukannya. Dengan kata lain, kapabilitas ini menciptakan peluang bagi individu untuk melakukan *fraud* dengan keyakinan bahwa mereka dapat menghindari konsekuensi negatif. Rini dan Sari (2019) dalam penelitian tentang *fraud* di sektor pendidikan menemukan bahwa individu yang memiliki kapabilitas tinggi dalam pengelolaan keuangan cenderung memiliki kontrol yang lebih besar terhadap sistem keuangan institusi, yang membuka peluang untuk korupsi dan penyalahgunaan aset. Teori atribusi relevan di sini karena individu tersebut dapat menganggap bahwa mereka tidak akan tertangkap karena mereka menguasai proses dan prosedur yang kompleks. Prabowo (2014) dalam studinya tentang korupsi di sektor publik menunjukkan bahwa kapabilitas, seperti pengetahuan

tentang proses audit dan kontrol internal yang lemah, menjadi faktor penting yang memungkinkan terjadinya *fraud*. Di perguruan tinggi, pejabat dengan kapabilitas tinggi dapat menggunakan kelemahan dalam sistem pengawasan untuk melakukan tindakan *fraud* dengan lebih mudah.

Kolusi merupakan tindakan *fraud* yang dilakukan oleh dua atau lebih individu atau kelompok secara bersama-sama, dengan tujuan untuk memanipulasi sistem atau melanggar aturan demi keuntungan pribadi atau kelompok. Ketika dikaitkan dengan teori atribusi, kolusi bisa dijelaskan melalui bagaimana individu atau kelompok menilai bahwa tindakan mereka adalah hasil dari tekanan eksternal atau kebutuhan bersama, yang pada akhirnya mereka anggap dapat dibenarkan. Dalam kasus kolusi, para pelaku seringkali mengatribusi perilaku curang mereka sebagai tanggapan atas faktor eksternal, seperti tekanan dari atasan, lingkungan kerja yang mendukung, atau kesempatan yang muncul karena kelemahan sistem. Dengan adanya kerja sama, mereka mungkin merasa tindakan tersebut lebih sulit terdeteksi dan lebih "dibenarkan" karena ada kesepakatan kolektif. Anderson (2019) dalam penelitian tentang kolusi di sektor pendidikan menyoroti bahwa kolusi sering terjadi ketika ada hubungan personal yang kuat antara individu dalam organisasi. Kolusi dapat terjadi antara rekan kerja atau antara pimpinan dan staf administrasi. Dengan adanya kolusi, mereka saling mendukung dan menutupi kesalahan satu sama lain. Pelaku beranggapan bahwa mereka tidak bertanggung jawab sepenuhnya, karena tindakan tersebut dilakukan secara bersama-sama dan dianggap sebagai tindakan yang "normal" dalam lingkungan kerja tersebut. Prabowo (2014) dalam kajiannya mengenai korupsi di sektor publik menunjukkan bahwa kolusi dapat terjadi ketika sistem pengendalian internal lemah dan individu merasa bahwa risiko deteksi rendah. Pelaku kolusi mengatribusi tindakan mereka pada kesempatan yang tersedia dan pada rasa aman yang diciptakan oleh kerja sama dengan orang lain. Di perguruan tinggi, ini bisa terjadi dalam bentuk kolusi untuk memanipulasi anggaran atau laporan keuangan demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Kolusi mempermudah terjadinya *fraud* di perguruan tinggi karena melibatkan lebih dari satu pihak yang bekerja sama untuk mengeksploitasi kelemahan dalam sistem.

Kesempatan merupakan salah satu faktor utama yang dapat menyebabkan terjadinya *fraud* di perguruan tinggi. Kesempatan yang muncul dari kelemahan dalam sistem pengendalian internal, kurangnya pengawasan, atau akses yang luas ke sumber daya dapat menciptakan situasi di mana individu merasa aman untuk melakukan tindakan curang. Teori atribusi berfokus pada bagaimana individu menjelaskan penyebab perilaku mereka, apakah dipengaruhi oleh faktor internal (disposisi) atau faktor eksternal (situasi). Dalam kasus *fraud*, kesempatan sering dianggap sebagai faktor eksternal yang memfasilitasi atau mendorong individu untuk melakukan tindakan yang melanggar aturan. Individu di perguruan tinggi, seperti staf keuangan atau manajer, mungkin menganggap bahwa sistem yang lemah atau minimnya pengawasan memberikan mereka kesempatan untuk melakukan *fraud* tanpa takut ketahuan. Sihombing et al. (2018) dalam penelitian mereka tentang *fraud* di perguruan tinggi di Indonesia menunjukkan bahwa kesempatan yang muncul dari sistem kontrol internal yang lemah, terutama dalam pengelolaan keuangan, meningkatkan risiko korupsi dan penyalahgunaan aset. Rini dan Sari (2019) dalam studi tentang *fraud* di sektor pendidikan menemukan bahwa kurangnya pengawasan dari pihak pengelola keuangan dan administrasi meningkatkan kesempatan bagi individu untuk melakukan tindakan *fraud*. Kesempatan memainkan peran krusial dalam memfasilitasi terjadinya *fraud* di perguruan tinggi, baik itu dalam bentuk korupsi, penyalahgunaan aset, maupun kecurangan laporan keuangan.

Rasionalisasi memungkinkan individu yang melakukan tindakan curang untuk membenarkan perilaku mereka secara moral, sehingga mengurangi perasaan bersalah atau tanggung jawab atas tindakan tersebut. Teori atribusi mempelajari bagaimana individu menjelaskan penyebab tindakan mereka—apakah didorong oleh faktor internal atau eksternal. Individu sering kali menganggap tindakan *fraud* sebagai sesuatu yang diperlukan atau dapat diterima karena berbagai alasan. Mereka mungkin menghubungkan perilaku curang dengan tekanan dari luar, ketidakadilan yang mereka alami, atau kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi. Dengan demikian, rasionalisasi memungkinkan pelaku untuk menutupi konflik

moral dan mengurangi rasa bersalah. Rini dan Sari (2019) dalam penelitian mereka tentang *fraud* di sektor pendidikan menemukan bahwa pelaku *fraud* sering kali merasionalisasi tindakan mereka dengan alasan bahwa mereka "berhak" atas lebih banyak uang karena merasa tidak mendapatkan kompensasi yang adil dari institusi. Sihombing et al. (2018) dalam penelitian tentang *fraud* di perguruan tinggi di Indonesia menyoroti bahwa pelaku *fraud* sering merasionalisasi korupsi atau penyalahgunaan aset dengan dalih bahwa sistem keuangan yang lemah membuat perilaku tersebut lebih mudah dilakukan dan, dalam pandangan mereka, "tidak merugikan siapa pun secara signifikan". Rasionalisasi memungkinkan pelaku *fraud* untuk membenarkan perilaku curang mereka secara moral dan mengurangi rasa bersalah.

Egoisme, atau sikap mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum, dapat menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya *fraud*. Pelaku *fraud* lebih cenderung mengatribusi tindakan curang mereka pada kebutuhan atau motivasi internal, seperti keinginan untuk kekayaan pribadi, status, atau keamanan finansial. Pelaku mungkin tidak merasa bersalah karena mereka menganggap bahwa kepentingan pribadi mereka lebih penting daripada dampak yang ditimbulkan pada orang lain atau institusi. Albrecht et al. (2014) dalam penelitian mereka mengenai *fraud* di institusi pendidikan menekankan bahwa individu yang memiliki kecenderungan egois lebih mungkin terlibat dalam tindakan korupsi dan penyalahgunaan aset. Di perguruan tinggi, staf atau pejabat yang memiliki akses ke sumber daya mungkin tergoda untuk memanfaatkan posisi mereka demi keuntungan pribadi, seperti mengalihkan dana institusi untuk kepentingan pribadi. Rini dan Sari (2019) menemukan bahwa egoisme sering kali menyebabkan pelaku *fraud* di sektor pendidikan merasionalisasi tindakan mereka dengan alasan bahwa mereka "berhak" atas keuntungan tertentu karena merasa telah berkontribusi besar bagi institusi. Di perguruan tinggi, hal ini bisa terjadi ketika individu menggunakan aset atau anggaran institusi untuk kepentingan pribadi. Kecenderungan untuk mementingkan kepentingan pribadi dapat secara signifikan meningkatkan risiko terjadinya *fraud* di perguruan tinggi.

Penelitian-penelitian terdahulu terkait *fraud* pada perguruan tinggi kebanyakan dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan melakukan studi literatur pada penelitian terdahulu untuk dikaji lebih dalam. Penelitian kualitatif baik untuk memperdalam suatu bahasan suatu topik, akan tetapi rentan terhadap bias perspektif dari pandangan pribadi peneliti. Kurangnya studi kuantitatif terhadap topik tersebut menjadikan alasan untuk mengembangkan studi empiris menggunakan metode kuantitatif, agar hasil yang didapatkan dapat lebih objektif dan sistematis, serta dapat lebih digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Studi terkait *fraud* di perguruan tinggi juga masih terbatas pada teori perkembangan teori *fraud pentagon*, dimana faktor kolusi belum dikaji terhadap kemungkinan *fraud* di perguruan tinggi. Penjelasan di atas menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya *Fraud* pada Perguruan Tinggi di Lampung".

1.2. Perumusan Masalah

Korupsi di sektor pendidikan, khususnya di perguruan tinggi, telah menjadi perhatian serius di Indonesia. Beberapa pola *fraud* yang sering ditemukan meliputi korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan dana hibah, penggelapan dana penelitian, serta ketidaktransparanan dalam pengelolaan dana internal. Kondisi ini menunjukkan adanya masalah sistemik dalam tata kelola dan transparansi anggaran pendidikan yang berpotensi memfasilitasi terjadinya *fraud*. Sistem yang belum optimal dari tingkat pusat hingga perguruan tinggi sering kali minim partisipasi publik, sehingga membuka celah bagi praktik *fraud*. Hal ini sejalan dengan teori *fraud* yang telah berkembang, seperti *Triangle Fraud*, *Diamond Fraud*, dan *Pentagon Fraud*, yang menyoroti tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan egoisme sebagai faktor utama pendorong *fraud*.

Namun, teori *Hexagon Fraud* dengan elemen kolusi memberikan dimensi baru dalam memahami kompleksitas *fraud* di perguruan tinggi, terutama mengingat kolusi sering menjadi inti dari berbagai skandal besar seperti Enron dan Parmalat. Di Indonesia, elemen kolusi ini perlu dikaji lebih dalam untuk memahami

bagaimana jaringan korupsi terbentuk dan beroperasi di lembaga pendidikan. Selain itu, masih terbatasnya penelitian kuantitatif mengenai *fraud* di perguruan tinggi menimbulkan tantangan dalam mencapai analisis yang objektif dan dapat digeneralisasi. Oleh karena itu, penelitian empiris menggunakan metode kuantitatif menjadi penting untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif dan sistematis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud* di perguruan tinggi, termasuk peran kolusi yang belum banyak diteliti. Penjelasan di atas menjadi dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *fraud* di perguruan tinggi, khususnya elemen *Hexagon Fraud*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah variabel tekanan berpengaruh terhadap *fraud* di Perguruan Tinggi?
2. Apakah variabel kapabilitas berpengaruh terhadap *fraud* di Perguruan Tinggi?
3. Apakah variabel kolusi berpengaruh terhadap *fraud* di Perguruan Tinggi?
4. Apakah variabel kesempatan berpengaruh terhadap *fraud* di Perguruan Tinggi?
5. Apakah variabel rasionalisasi berpengaruh terhadap *fraud* di Perguruan Tinggi?
6. Apakah variabel egoisme berpengaruh terhadap *fraud* di Perguruan Tinggi?

1.3. Tujuan Penelitian

Sementara itu, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendapatkan bukti empiris bahwa tekanan berpengaruh terhadap *fraud* di Perguruan Tinggi.
2. Mendapatkan bukti empiris bahwa kapabilitas berpengaruh terhadap *fraud* di Perguruan Tinggi.
3. Mendapatkan bukti empiris bahwa kolusi berpengaruh terhadap *fraud* di Perguruan Tinggi.
4. Mendapatkan bukti empiris bahwa kesempatan berpengaruh terhadap *fraud* di Perguruan Tinggi.
5. Mendapatkan bukti empiris bahwa rasionalisasi berpengaruh terhadap *fraud* di Perguruan Tinggi.

6. Mendapatkan bukti empiris bahwa egoisme berpengaruh terhadap *fraud* di Perguruan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Secara teori, penelitian ini memiliki beberapa kegunaan penting dalam mengembangkan pemahaman tentang fenomena *fraud* di perguruan tinggi, khususnya di Indonesia:

1. Penelitian ini dapat memperluas kajian teori-teori *fraud* seperti *Triangle Fraud*, *Diamond Fraud*, dan *Pentagon Fraud* dengan menambah dimensi kolusi, sebagaimana dijelaskan dalam *Hexagon Fraud*. Hal ini akan memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud* di perguruan tinggi, termasuk elemen kolusi yang sering kali belum cukup terbahas dalam konteks pendidikan.
2. Melalui pendekatan kuantitatif yang diusulkan, penelitian ini akan menyumbang pada validasi empiris terhadap teori-teori *fraud* yang sudah ada. Penelitian ini juga berpotensi membuktikan relevansi dan efektivitas model-model *fraud* dalam menjelaskan kejadian *fraud* di perguruan tinggi.
3. Penelitian ini dapat mengkaji secara kritis hubungan antara kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan dan potensi terjadinya *fraud*. Dari sudut pandang teori tata kelola, studi ini akan memberikan landasan teoretis untuk memahami bagaimana tata kelola yang lemah menciptakan kesempatan bagi pelaku *fraud*.
4. Penelitian ini juga akan berkontribusi dalam memperkaya pemahaman teoritis mengenai faktor-faktor yang mendorong terjadinya *fraud* di sektor pendidikan, seperti tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, egoisme, dan kolusi. Penambahan faktor kolusi dalam konteks perguruan tinggi dapat memberikan wawasan baru yang belum banyak dikaji dalam literatur.

Secara praktik, penelitian ini memiliki berbagai kegunaan yang signifikan bagi pemangku kepentingan di sektor pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi, di antaranya:

1. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi konkret untuk memperbaiki sistem tata kelola di perguruan tinggi, khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
2. Dengan mengidentifikasi pola-pola dan faktor-faktor yang memicu *fraud*, penelitian ini dapat membantu institusi pendidikan dalam mengembangkan mekanisme pencegahan dan deteksi dini terhadap potensi *fraud*.
3. Hasil penelitian dapat dijadikan dasar untuk menyusun atau memperbaiki kebijakan dan regulasi antikorupsi di perguruan tinggi. Pemerintah dan Kementerian Pendidikan dapat menggunakan temuan ini untuk memperkuat regulasi terkait transparansi anggaran dan pengelolaan keuangan di perguruan tinggi, termasuk mewajibkan partisipasi publik dan pemangku kepentingan dalam penyusunan program dan anggaran.
4. Penelitian ini dapat membantu lembaga pendidikan dalam menciptakan budaya akademik yang lebih berintegritas. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor seperti egoisme dan kolusi yang memicu *fraud*, perguruan tinggi dapat memperbaiki etika dan moralitas akademik melalui pelatihan, program etika, dan peningkatan kontrol internal.
5. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat, mahasiswa, dosen, dan pemangku kepentingan lain mengenai pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam tata kelola perguruan tinggi. Hal ini dapat memotivasi lebih banyak pihak untuk terlibat dalam pengawasan publik terhadap penggunaan dana pendidikan, sehingga mencegah terjadinya *fraud* di sektor pendidikan.

II. LANDASAN TEORI

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Atribusi

Teori atribusi adalah sebuah kerangka teoritis yang menjelaskan bagaimana kita mencari dan menentukan penyebab serta motif di balik perilaku seseorang (Heider, 1958). Teori ini memperhatikan apakah perilaku seseorang berasal dari faktor internal seperti karakter, sikap, atau sifat, atau faktor eksternal seperti tekanan situasional mempengaruhi perilaku. Teori atribusi memberikan pemahaman tentang bagaimana individu bereaksi terhadap peristiwa di sekitar mereka dengan mencari penjelasan atas kejadian yang dialami. Teori ini juga menyatakan bahwa perilaku seseorang terkait dengan sikap dan karakteristik individunya, sehingga serta dapat digunakan untuk memprediksi bagaimana individu tersebut akan berperilaku dalam menghadapi situasi tertentu.

Fritz Heider mengajukan bahwa kekuatan internal (seperti kemampuan, usaha, dan kelelahan) dan kekuatan eksternal (seperti aturan dan cuaca) akan membentuk perilaku manusia, serta persepsi tidak langsung merupakan faktor utama dalam pembentukan perilaku. Atribusi internal dan eksternal akan memberikan pengaruh terhadap evaluasi kinerja individu, serta sikap dan kepuasan individu terhadap pekerjaannya. Perilaku seseorang dapat bervariasi tergantung seberapa besar mereka menganggap atribut internal dibandingkan atribut eksternal dalam situasi tertentu. Dalam konteks penelitian ini, peneliti menggunakan teori atribusi untuk melakukan studi empiris tentang faktor-faktor yang memengaruhi seseorang untuk melakukan penyimpangan dalam pekerjaannya demi tujuan pribadi atau kelompoknya.

2.1.2. *Fraud*

Fraud adalah istilah umum dalam dunia akuntansi, auditor, investor, dan masyarakat ekonomi. *Fraud* merupakan berbagai tindakan yang melanggar hukum dan dilakukan dengan sengaja untuk mencapai tujuan tertentu, seperti manipulasi atau penyajian informasi yang salah kepada pihak lain. Tindakan ini dapat dilakukan oleh individu baik dari dalam maupun luar organisasi, dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, yang dapat merugikan pihak lain secara langsung atau tidak langsung. Kecenderungan *fraud* terdiri dari 3 indikator, yaitu kecurangan laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi (*Association of Certified Fraud Examiners*, 2000). Pemahaman yang jelas tentang definisi dan karakteristik *fraud* penting bagi praktisi akuntansi, auditor, dan investor untuk melindungi kepentingan mereka dan memastikan integritas dalam pelaporan keuangan serta operasional perusahaan.

Triangle Fraud yang menyatakan bahwa tiga komponen, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi, merupakan dasar terjadinya penipuan dan bertanggung jawab atas motivasi seseorang untuk melakukan *fraud* (Cressey, 1953). Akhirnya, teori ini berkembang menjadi model *Diamond Fraud*, yang mengusulkan tekanan, kemampuan, kesempatan, dan rasionalisasi sebagai alasan untuk *fraud* (Wolfe & Hermanson, 2004). Setelah itu, model *fraud diamond* dikembangkan menjadi *Pentagon Fraud* dengan menambahkan egoisme sebagai elemen baru dalam memicu *fraud* (Marks, 2009). Kemudian, teori *Hexagon Fraud* lahir sebagai teori yang dapat diperbarui dalam mendeteksi pemicu *fraud* (Vousinas, 2019).

2.1.3. *Hexagon Fraud*

Teori *fraud* berkembang, yang semula terdiri dari *Stimulus* (tekanan), *Capability* (kapabilitas), *Opportunity* (kesempatan), *Rationalization* (rasionalisasi), dan *Egoism* (egoisme) atau disebut dengan *the S.C.O.R.E. Model*, menjadi *the S.C.C.O.R.E. Model* (Vousinas, 2019). *Model* dengan menambahkan elemen *Collusion*

(kolusi) ke dalam model tersebut. Vousinas menyatakan bahwa kolusi merupakan tindakan yang dilakukan oleh beberapa pihak atau kelompok, baik pihak internal maupun dengan pihak eksternal, untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau pihak tertentu dari organisasi. Ketika kecurangan kolusi ini terjadi dengan skala yang cukup besar, maka hal ini akan menyebabkan budaya organisasi akan bergeser menjadi tidak baik sehingga karyawan yang awalnya jujur pun akan ikut bergabung ke dalam kolusi tersebut. Terlebih bila salah seorang dari pelaku kolusi memiliki kemampuan persuasif yang tinggi sehingga dengan mudah mempengaruhi karyawan yang lain.

2.1.3.1. Tekanan

Tekanan yang memicu terjadinya *fraud* sering kali berupa tekanan keuangan yang sulit untuk diungkapkan kepada orang lain (Cressey, 1953). Tekanan ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk tekanan finansial dan non-finansial, seperti tekanan politik dan sosial (Vousinas, 2019). Menurut Vousinas, tekanan-tekanan ini bisa berupa kebutuhan finansial yang tinggi, frustrasi akibat lingkungan kerja yang tidak mendukung, target yang harus dicapai, atau dorongan untuk mendapatkan posisi tertentu dalam waktu singkat. Albrecht et al. (2019) mengidentifikasi empat indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tekanan dalam kecenderungan melakukan *fraud*, yaitu tekanan finansial, tekanan akibat kebiasaan buruk, tekanan pekerjaan, hedonisme, dan *Love of money*.

Baik tekanan finansial maupun non-finansial dapat berperan penting dalam terjadinya *fraud* di perguruan tinggi, yang mencakup korupsi, penyalahgunaan aset, dan manipulasi laporan keuangan. Berdasarkan teori atribusi, individu sering kali mengaitkan perilaku mereka dengan faktor eksternal atau internal. Dalam hal ini, tekanan finansial, seperti kebutuhan mendesak untuk memenuhi target pendapatan atau ketidakstabilan anggaran, dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan tidak etis, seperti memanipulasi laporan keuangan demi mencapai hasil yang diharapkan (Albrecht et al., 2011). Sementara itu, tekanan non-finansial, seperti tuntutan dari atasan atau lingkungan kerja yang kompetitif,

juga dapat memicu *fraud* sebagai cara untuk menjaga posisi atau reputasi seseorang.

Penelitian oleh Andayani et al. (2020) tentang korupsi di sektor pendidikan menunjukkan bahwa tekanan politik dan sosial dari pemangku kepentingan dapat memaksa institusi pendidikan tinggi untuk melakukan penyalahgunaan aset dan anggaran. Selain itu, Albrecht et al. (2014) menemukan bahwa tekanan untuk mempertahankan citra atau reputasi institusi sering kali menyebabkan *fraud* dalam pelaporan keuangan. Perguruan tinggi merasa terdorong untuk menunjukkan kinerja yang baik, meskipun sebenarnya mereka menghadapi tantangan finansial.

2.1.3.2. Kapabilitas

Kapabilitas merupakan salah satu elemen penting dalam teori *diamond fraud* yang diusulkan oleh Wolfe dan Hermanson (2004). Mereka mendefinisikan kapabilitas sebagai kemampuan individu untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang secara berulang. Kasus-kasus *fraud* yang melibatkan kecurangan besar pada laporan keuangan tidak mungkin terjadi tanpa adanya individu yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dengan demikian, kapabilitas merujuk pada sifat dan kemampuan seseorang yang menentukan apakah *fraud* tersebut akan terwujud (Vousinas, 2019). Pelaku *fraud* yang berhasil umumnya memiliki pemahaman yang baik tentang kelemahan dalam sistem kontrol internal dan mampu menggunakan posisi, fungsi, atau akses yang dimiliki untuk mencapai tujuan pribadi. Mereka juga mampu menyembunyikan tindakan mereka dengan efisien dan konsisten, serta dapat mengatasi stres yang mungkin muncul selama proses tersebut (Wolfe & Hermanson, 2004). Menurut Vousinas (2019), terdapat tiga indikator untuk mengukur kapabilitas, yaitu pengetahuan individu, kemampuan individu, dan sikap atau *attitude* individu.

Kapabilitas individu, termasuk perguruan tinggi, dapat menjadi faktor yang mendukung terjadinya *fraud*. Dalam kerangka teori atribusi, perilaku ini dapat dijelaskan dengan pemahaman tentang bagaimana individu menilai kemampuan

dan peluang mereka untuk melakukan tindakan *fraud* tanpa terdeteksi atau dengan risiko yang rendah. Individu dengan kapabilitas tinggi (pengetahuan, akses, dan kontrol) cenderung menganggap perilaku curang mereka sebagai sesuatu yang dapat dibenarkan atau mungkin dilakukan karena adanya kesempatan dan keterampilan untuk melakukannya. Dengan kata lain, kapabilitas ini menciptakan peluang bagi individu untuk melakukan *fraud* dengan keyakinan bahwa mereka dapat menghindari konsekuensi negatif.

Rini dan Sari (2019) dalam penelitian mereka tentang *fraud* di sektor pendidikan menemukan bahwa individu dengan kapabilitas tinggi dalam pengelolaan keuangan cenderung memiliki kontrol lebih besar terhadap sistem keuangan institusi, yang membuka peluang untuk korupsi dan penyalahgunaan aset. Teori atribusi menjadi relevan di sini karena individu tersebut dapat meyakini bahwa mereka tidak akan tertangkap, berkat penguasaan mereka terhadap proses dan prosedur yang kompleks. Prabowo (2014) juga menunjukkan bahwa kapabilitas, seperti pengetahuan tentang proses audit dan kelemahan dalam kontrol internal, merupakan faktor penting yang memungkinkan terjadinya *fraud* di sektor publik. Di perguruan tinggi, pejabat dengan kapabilitas tinggi dapat memanfaatkan kelemahan dalam sistem pengawasan untuk melakukan tindakan *fraud* dengan lebih mudah.

2.1.3.3. Kolusi

Kolusi merupakan elemen tambahan dalam model *Hexagon Fraud* yang dikemukakan oleh Vousinas (2019). Menurutya, *fraud* dan kejahatan kerah putih sering kali disebabkan oleh kolusi, yaitu adanya kesepakatan atau kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan tindakan penipuan atau kejahatan. Pihak yang terlibat dalam kolusi bisa terdiri dari sesama karyawan atau bahkan melibatkan pihak luar. Vousinas (2019) mengidentifikasi empat indikator untuk mengukur kolusi, yaitu penyalahgunaan posisi, penyalahgunaan sumber daya, penyalahgunaan kekuasaan, dan tidak ada tindakan. Kolusi merupakan tindakan *fraud* yang dilakukan oleh dua atau lebih individu atau kelompok secara bersama-

sama untuk memanipulasi sistem atau melanggar aturan demi mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Dalam situasi kolusi, para pelaku sering kali mengaitkan perilaku curang mereka dengan faktor eksternal, seperti tekanan dari atasan, dukungan lingkungan kerja, atau peluang yang muncul akibat kelemahan dalam sistem. Dengan adanya kerja sama, mereka mungkin merasa bahwa tindakan tersebut lebih sulit untuk terdeteksi dan lebih "dibenarkan" karena ada kesepakatan kolektif.

Anderson (2019) dalam penelitiannya mengenai kolusi di sektor pendidikan menunjukkan bahwa kolusi sering terjadi ketika ada hubungan personal yang kuat di antara individu dalam organisasi. Kolusi dapat terjadi antara rekan kerja atau antara pimpinan dan staf administrasi. Dalam situasi ini, mereka saling mendukung dan menutupi kesalahan satu sama lain. Pelaku mungkin beranggapan bahwa mereka tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakan tersebut, karena dilakukan secara bersama-sama dan dianggap sebagai perilaku yang "normal" di lingkungan kerja. Prabowo (2014) dalam kajiannya tentang korupsi di sektor publik menyatakan bahwa kolusi dapat muncul ketika sistem pengendalian internal lemah, dan individu merasa risiko terdeteksi sangat rendah. Pelaku kolusi mengaitkan tindakan mereka dengan adanya kesempatan dan rasa aman yang ditawarkan oleh kerja sama dengan orang lain. Di perguruan tinggi, kolusi dapat terwujud dalam bentuk manipulasi anggaran atau laporan keuangan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Kolusi mempermudah terjadinya *fraud* di perguruan tinggi karena melibatkan lebih dari satu pihak yang bekerja sama untuk mengeksploitasi kelemahan dalam sistem.

2.1.3.4. Kesempatan

Kesempatan dianggap sebagai akar penyebab tindakan *fraud*. Dalam konteks pengendalian internal, kesempatan adalah faktor utama yang menyebabkan terjadinya *fraud* (Vousinas, 2019). Organisasi seharusnya mampu melakukan tindakan pencegahan melalui mitigasi risiko dan penerapan sistem pengendalian internal yang efektif. Namun, seringkali tanda-tanda adanya potensi *fraud*

diabaikan dalam organisasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi organisasi untuk fokus pada risiko yang dapat dikelola, sesuai dengan mitigasi “*opportunity risk*”, agar sistem pengendalian internal berfungsi sebagai strategi pencegahan dan deteksi yang menyeluruh. Albrecht et al. (2019) mengidentifikasi enam indikator untuk mengukur kesempatan, yaitu lemahnya kontrol internal; ketidakmampuan dalam menilai kualitas kerja; gagal membina pelaku *fraud*; kurangnya akses informasi; ketidaktahuan, apatis, dan kemampuan yang tidak memadai dari pihak yang dirugikan; dan kurangnya pemeriksaan.

Di perguruan tinggi, individu seperti staf keuangan atau manajer mungkin menganggap bahwa kelemahan dalam sistem atau minimnya pengawasan memberi mereka kesempatan untuk melakukan *fraud* tanpa takut tertangkap. Penelitian oleh Sihombing et al. (2018) tentang *fraud* di perguruan tinggi di Indonesia menunjukkan bahwa kesempatan yang muncul dari sistem kontrol internal yang lemah, khususnya dalam pengelolaan keuangan, meningkatkan risiko korupsi dan penyalahgunaan aset. Rini dan Sari (2019) juga menemukan dalam studi mereka mengenai *fraud* di sektor pendidikan bahwa kurangnya pengawasan dari pihak pengelola keuangan dan administrasi memperbesar kesempatan bagi individu untuk melakukan tindakan *fraud*. Kesempatan memainkan peran krusial dalam memfasilitasi terjadinya *fraud* di perguruan tinggi, baik dalam bentuk korupsi, penyalahgunaan aset, maupun kecurangan laporan keuangan.

2.1.3.5. Rasionalisasi

Rasionalisasi berkaitan dengan cara individu membenarkan tindakan *fraud* yang mereka lakukan. Pelaku kejahatan umumnya cenderung merasionalisasi tindakan mereka sebagai sesuatu yang tidak dianggap sebagai kejahatan, menganggapnya dapat dibenarkan, atau beranggapan bahwa mereka tidak sepenuhnya bertanggung jawab (Cressey, 1953). Banyak pelaku *fraud* memandang diri mereka sebagai orang yang jujur dan menciptakan berbagai alasan agar tindakan mereka diterima oleh diri sendiri dan orang lain. Terdapat lima indikator rasionalisasi yang

diidentifikasi oleh Albrecht et al. (2019), yaitu rasa memiliki aset organisasi, hanya bersifat meminjam, tidak ada yang dirugikan, perasaan pantas mendapatkan yang lebih, dan melakukan *fraud* untuk tujuan yang baik.

Teori atribusi mengkaji bagaimana individu menjelaskan penyebab perilaku mereka, apakah didorong oleh faktor internal atau eksternal. Individu sering kali menganggap tindakan *fraud* sebagai hal yang diperlukan atau dapat diterima karena berbagai alasan yang mereka ciptakan. Rini dan Sari (2019) dalam penelitian mereka tentang *fraud* di sektor pendidikan menemukan bahwa pelaku *fraud* sering merasionalisasi tindakan mereka dengan alasan bahwa mereka "berhak" atas lebih banyak uang karena merasa tidak mendapatkan kompensasi yang adil dari institusi tempat mereka bekerja. Sihombing et al. (2018) juga menyoroti dalam penelitian tentang *fraud* di perguruan tinggi di Indonesia bahwa pelaku sering merasionalisasi korupsi atau penyalahgunaan aset dengan menyatakan bahwa kelemahan dalam sistem keuangan membuat perilaku tersebut lebih mudah dilakukan dan, menurut pandangan mereka, "tidak merugikan siapa pun secara signifikan." Dengan demikian, rasionalisasi memungkinkan pelaku *fraud* untuk secara moral membenarkan tindakan curang mereka dan mengurangi rasa bersalah yang mereka alami.

2.1.3.6. Egoisme

Egoisme merupakan hasil dari interaksi antara dorongan batin individu untuk memenuhi keinginan mereka (Vousinas, 2019). Kepribadian manusia terdiri dari dua bagian: "*the id*," yang mencakup dorongan untuk mendapatkan kebutuhan dasar seperti makanan dan seks, serta "*super ego*," yang mewakili kesadaran akan nilai-nilai dan moral yang diterapkan dalam masyarakat melalui adat istiadat, agama, dan lingkungan sekitar. Egoisme berfungsi sebagai jembatan antara tuntutan dari "*the id*," *super ego*, dan lingkungan. Untuk dapat melakukan tindakan *fraud*, seseorang perlu memiliki egoisme yang kuat agar dapat berkeyakinan dalam melakukannya (Vousinas, 2019). Banyak kasus *fraud* terjadi karena adanya rasa superioritas, keinginan untuk menguasai, dan dorongan untuk

mendapatkan kekaguman dari orang lain. Dengan kata lain, pelaku *fraud* merasakan kepuasan ketika mereka berhasil melaksanakan rencana mereka dan merasa telah berhasil membodohi sistem atau orang lain. Terdapat enam indikator yang dapat digunakan untuk mengukur egoisme, sebagaimana diungkapkan oleh Howarth (2011), yaitu memiliki egoisme yang besar, menganggap kontrol internal tidak berlaku, kepemimpinan yang otoriter, takut kehilangan posisi atau status, machiavellianism, dan narsistik.

Egoisme, atau sikap mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum, dapat menjadi faktor utama yang memicu terjadinya *fraud*. Pelaku *fraud* cenderung mengaitkan tindakan curang mereka dengan kebutuhan atau motivasi internal, seperti keinginan untuk memperoleh kekayaan, status, atau keamanan finansial. Mereka mungkin tidak merasa bersalah karena menganggap kepentingan pribadi mereka lebih penting daripada dampak yang ditimbulkan pada orang lain atau institusi. Albrecht et al. (2014) dalam penelitian mereka mengenai *fraud* di institusi pendidikan menekankan bahwa individu dengan kecenderungan egois lebih mungkin terlibat dalam tindakan korupsi dan penyalahgunaan aset. Di perguruan tinggi, staf atau pejabat yang memiliki akses ke sumber daya mungkin tergoda untuk memanfaatkan posisi mereka demi keuntungan pribadi, seperti mengalihkan dana institusi untuk kepentingan pribadi. Rini dan Sari (2019) menemukan bahwa egoisme sering kali membuat pelaku *fraud* di sektor pendidikan merasionalisasi tindakan mereka dengan alasan bahwa mereka "berhak" mendapatkan keuntungan tertentu karena merasa telah berkontribusi besar terhadap institusi. Hal ini dapat terjadi ketika individu menggunakan aset atau anggaran institusi untuk kepentingan pribadi. Kecenderungan untuk mementingkan kepentingan pribadi dapat secara signifikan meningkatkan risiko terjadinya *fraud* di perguruan tinggi.

2.2. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa riset terdahulu yang meneliti terkait *fraud* di perguruan tinggi:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Author dan Tahun Publikasi	Hasil
1	<i>Corruption and Fraudulent Activities in Higher Education: A Study of Literature</i>	Ludwina Harahap, Jaka Isgiyarta (2023)	Faktor-faktor seperti tekanan, peluang, rasionalisasi, kompetensi, dan egoisme berkontribusi terhadap kecenderungan penipuan, dengan nilai-nilai etika berperan sebagai pengaruh moderat. Perubahan struktural dan peningkatan nilai-nilai etika diperlukan untuk memerangi korupsi secara efektif.
2	<i>Students' Perceptions of Corruption in a Spanish Public University: A Path Analysis</i>	Marti F. Julian, Tomás Bonavía (2022)	Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa siswa menganggap favoritisme lebih umum terjadi dibandingkan penyuapan, penipuan, dan penggelapan. Hasil analisis menunjukkan bahwa persepsi risiko berkorelasi negatif dengan pembenaran, dan niat korupsi menurun seiring dengan meningkatnya persepsi risiko.
3	<i>Determinants of Students' Willingness to Engage in Corruption in an Academic Setting: an Empirical Study</i>	Marti F. Julian, Tomás Bonavía (2020)	Pelajar lebih cenderung melakukan korupsi non-moneter seperti favoritisme, namun kecil kemungkinannya untuk melakukan korupsi moneter seperti penggelapan, dengan tingkat penerimaan korupsi yang rendah.
4	<i>How Corrupt Are Universities? Audit Culture, Fraud Prevention, and the Big Four Accountancy Firms</i>	C. Shore (2018)	Makalah ini menjelaskan fenomena tersebut melalui kacamata teori korupsi institusional dan berpendapat bahwa evolusi akademisi modern membentuk sistem insentif yang salah, sehingga memberikan kekuasaan berlebihan kepada birokrat, yang pada akhirnya mendistorsi kinerja sektor pendidikan tinggi dan melemahkan efektivitas lembaga penting ini.
5	<i>Approaches to Corruption: a Synthesis of the Scholarship</i>	M. Prasad, Mariana Borges Martins da Silva, Andre Nickow (2018)	Praktik <i>fraud</i> dapat terjadi di setiap bagian kebijakan dan prosedur akreditasi. <i>Blockchain</i> mencegah perubahan pada sistem dan memungkinkan audit perubahan. Sistem seperti ini dapat menekan <i>fraud</i> akreditasi dan

			meminimalkan dampak korupsinya. Belum lagi mengidentifikasi dengan relatif mudah betapa parahnya dan kehidupan praktik korupsi.
6	<i>Of Worms and woodpeckers: governance & corruption in East and Southeast Asian higher education</i>	A. Welch (2020)	Di negara-negara dengan tingkat korupsi rendah, angka partisipasi pendidikan tinggi negeri meningkatkan lama sekolah yang diharapkan, sementara di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, angka tersebut menurun.
7	<i>Corruption and education in developing countries: The role of public vs. private funding of higher education</i>	Nicole Duerrenberger, Susanne Warning (2018)	Tinjauan sejarah pendidikan tinggi Rusia menunjukkan bahwa korupsi merupakan isu yang kompleks. Hal ini hanya dapat dipahami sepenuhnya dalam konteks sejarah dan budaya tertentu, dengan menetapkan beberapa faktor lain seperti frekuensinya, keterikatannya pada institusi pendidikan tinggi dan masyarakat pada umumnya, dan kemungkinan alasan kurangnya integritas akademik.
8	<i>The Problem of Institutional Corruption in the System of Higher Education</i>	I. T. Ekaterina, A. T. Dmitrii (2019)	Penelitian menunjukkan bahwa meskipun ketiga pendekatan antikorupsi merupakan alat yang berharga dalam memerangi korupsi birokrasi, ketiga pendekatan tersebut memerlukan penelitian yang lebih sistematis untuk mengembangkan metode reformasi korupsi yang layak.
9	<i>Academic Dishonesty at Russian Universities: A Historical Overview</i>	Elena Viktorovna Denisova-Schmidt (2023)	Universitas semakin terpengaruh oleh narasi korupsi dan kebangkitan budaya audit, dengan firma akuntansi “Empat Besar” yang berperan dalam inisiatif antikorupsi dan berpotensi berkolusi dalam risiko dan korupsi.
10	<i>Fraud in higher education: a system for detection and prevention</i>	T. D. Souza-Daw, Robert Ross (2021)	Korupsi dalam pendidikan tinggi di Asia Timur dan Tenggara adalah hal biasa, namun sebagian besar sistem mempunyai peringkat yang buruk dalam hal transparansi konvensional, hal ini menunjukkan betapa rumitnya hubungan antara korupsi dan tata kelola di wilayah ini.

Sumber: data diolah, 2025

2.3. Hipotesis

Model analisis ini dikembangkan berdasarkan studi literatur yang tersedia, sebagaimana tercermin dalam kerangka pemikiran teoretis dan hipotesis yang diajukan. Pemikiran teoretis dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

2.3.1. Pengaruh Tekanan terhadap *Fraud*

Berdasarkan teori atribusi, perilaku seseorang, termasuk tindakan *fraud*, dipengaruhi oleh bagaimana individu tersebut menginterpretasikan penyebab dari situasi yang dihadapinya. Teori ini menekankan bahwa seseorang dapat melakukan atribusi terhadap faktor internal (seperti karakteristik pribadi) atau faktor eksternal (seperti kondisi lingkungan) untuk menjelaskan perilaku tertentu. Dalam konteks *fraud*, tekanan eksternal menjadi faktor penting yang memicu seseorang melakukan tindakan yang menyimpang. Tekanan tersebut bisa berasal dari berbagai sumber, seperti tekanan finansial, politik, maupun sosial, yang menyebabkan individu merasakan ketidakmampuan untuk memenuhi ekspektasi atau kebutuhan tertentu melalui cara yang sah.

Beberapa penelitian empiris mendukung hipotesis bahwa tekanan, baik finansial maupun non-finansial, dapat memicu tindakan *fraud* di lingkungan organisasi pemerintah. Suprpta dan Padnyawati (2021) menemukan bahwa tekanan finansial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan *fraud* pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Dawan. Mereka menyatakan bahwa Tekanan finansial mendorong *fraud* akuntansi terjadi karena kebutuhan harus dipenuhi. Selain itu, penelitian oleh Nurhafifa, Rahmawati, dan Abid Ramadhan (2021) menunjukkan bahwa tekanan eksternal berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan pada bank umum. Mereka mencatat bahwa stabilitas keuangan dan tekanan eksternal berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan secara parsial dan simultan.

Penelitian lain oleh Noviyanti dan Adityawarman (2023) mengidentifikasi bahwa tekanan juga berpengaruh terhadap tindakan *fraud* pada aparatur sipil negara di Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang. Mereka menekankan bahwa tekanan memiliki pengaruh positif terhadap *fraud* pada lingkungan DJKN, Kementerian Keuangan. Selain tekanan finansial, tekanan non-finansial seperti tuntutan kinerja juga dapat memicu *fraud*. Penelitian oleh Takalamingan et al. (2022) menunjukkan bahwa tekanan memiliki pengaruh positif terhadap *fraud*. Mereka menyatakan bahwa "tekanan memiliki pengaruh positif terhadap *fraud* pada lingkungan DJKN, Kementerian Keuangan. Bukti-bukti tersebut menekankan bahwa baik tekanan finansial maupun non-finansial dapat menjadi pendorong terjadinya kecurangan di sektor publik. Oleh karena itu, penting bagi organisasi pemerintah untuk mengidentifikasi dan mengelola berbagai bentuk tekanan guna mencegah praktik *fraud*."

Dalam perspektif teori atribusi, individu yang merasakan tekanan ini akan lebih cenderung melakukan atribusi eksternal, yaitu menganggap bahwa kondisi di luar dirinya (seperti tekanan ekonomi atau sosial) adalah penyebab dari tindakannya. Mereka akan melihat *fraud* sebagai "solusi" rasional atas tekanan yang mereka hadapi, dan menggunakan tekanan tersebut sebagai justifikasi moral untuk tindakan mereka. Dengan demikian, semakin besar tekanan yang dialami, semakin tinggi kemungkinan individu tersebut untuk melakukan *fraud*, karena tekanan ini dianggap sebagai faktor penyebab yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan mereka. Hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H1: Tekanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fraud*.

2.3.2. Pengaruh Kapabilitas terhadap *Fraud*

Kapabilitas (*capability*) dalam konteks *fraud* mengacu pada kemampuan individu untuk mengidentifikasi, mengeksploitasi, dan mengendalikan celah dalam sistem organisasi guna melakukan tindakan *fraud*. Menurut teori *Diamond Fraud* yang dikemukakan oleh Wolfe & Hermanson (2004), selain tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi, kapabilitas merupakan faktor penting yang memungkinkan individu

untuk melakukan *fraud*. Pelaku *fraud* yang berasal dari internal organisasi biasanya memiliki pemahaman mendalam mengenai proses dan kelemahan dalam sistem, serta akses ke informasi atau sumber daya yang memungkinkan mereka untuk melakukan tindakan *fraud* tanpa terdeteksi.

Dalam teori atribusi, perilaku individu dijelaskan melalui interpretasi terhadap penyebab dari tindakan tersebut. Kapabilitas individu dapat dianggap sebagai salah satu faktor internal yang berkontribusi terhadap keputusan untuk melakukan *fraud*. Kapabilitas ini memungkinkan individu untuk memanipulasi situasi, baik melalui pengetahuan teknis, posisi yang mereka miliki, maupun kecakapan dalam mengelola risiko sosial atau hukum dari tindakan mereka. Ketika individu merasa mampu mengendalikan situasi dan meminimalkan risiko, mereka lebih mungkin merasionalisasi tindakan *fraud* sebagai langkah yang "diperlukan" atau bahkan wajar, terutama jika mereka merasa tekanan eksternal memaksa mereka untuk bertindak.

Kapabilitas individu memainkan peran penting dalam terjadinya *fraud* di lingkungan organisasi. Wolfe dan Hermanson (2004) menambahkan elemen kapabilitas dalam model *diamond fraud*, menekankan bahwa individu dengan kapabilitas tertentu memiliki peluang lebih besar untuk melakukan *fraud*. Mereka menyatakan bahwa peluang membuka pintu gerbang menuju penipuan, dan insentif serta rasionalisasi dapat menarik orang ke arahnya. Namun, orang tersebut harus memiliki kemampuan untuk mengenali pintu gerbang yang terbuka sebagai peluang dan memanfaatkannya dengan melangkah melewatinya, tidak hanya sekali, tetapi berkali-kali. Penelitian oleh Budiartini et al. (2019) mendukung hal ini dengan menunjukkan bahwa semakin tinggi kapabilitas individu, semakin besar peluang mereka untuk melakukan tindakan *fraud*. Mereka menemukan bahwa posisi jabatan berpengaruh signifikan positif terhadap *fraud* akuntansi.

Selain itu, Nita dan Supadmi (2019) menyoroti bahwa individu dengan kapabilitas tinggi, seperti pemahaman mendalam tentang sistem dan kontrol internal, memiliki potensi lebih besar untuk melakukan kecurangan akuntansi. Mereka

menyatakan bahwa pengendalian internal, integritas, asimetri informasi, dan kapabilitas berpengaruh signifikan terhadap *fraud* akuntansi. Kapabilitas individu, yang mencakup posisi, pengetahuan, dan keterampilan tertentu, dapat meningkatkan peluang terjadinya *fraud* dalam organisasi. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk mengidentifikasi dan mengelola kapabilitas individu guna mencegah praktik *fraud*. Dengan demikian, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H2: Kapabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fraud*.

2.3.3. Pengaruh Kolusi terhadap *Fraud*

Berdasarkan teori *Hexagon Fraud*, kolusi yang didefinisikan sebagai perjanjian antara dua orang atau lebih untuk melakukan *fraud* merupakan faktor penting dalam terjadinya *fraud*. Kolusi seringkali mempengaruhi sistem pengawasan dan integritas internal sebuah organisasi, karena adanya kerjasama antara individu-individu untuk menghindari deteksi dan mengelabui sistem pengendalian. Kolusi dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk untuk mencapai keuntungan bersama, mengatasi tekanan internal, atau menghindari konsekuensi dari tindakan *fraud* (Vousinas, 2019).

Menurut teori atribusi, individu yang terlibat dalam kolusi akan cenderung melakukan atribusi terhadap situasi yang mereka hadapi dengan melihat adanya dukungan atau perlindungan dari rekan-rekannya, serta adanya kesempatan untuk memanipulasi sistem secara bersama-sama. Dalam konteks ini, kolusi dapat dianggap sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan untuk melakukan *fraud*. Individu yang terlibat dalam kolusi mungkin merasa lebih aman untuk melakukan tindakan *fraud* karena adanya dukungan dari pihak lain yang mereka anggap sebagai "kawan" dalam tindakan tersebut, serta adanya mekanisme perlindungan yang mengurangi risiko penangkapan.

Beberapa penelitian empiris mendukung hipotesis bahwa kolusi dalam organisasi dapat meningkatkan risiko terjadinya *fraud*. Desviana et al. (2020) menambahkan

elemen kolusi dalam teori *Hexagon Fraud*, menekankan bahwa kolusi antara individu atau kelompok dalam organisasi dapat menciptakan kesempatan untuk melakukan *fraud* tanpa terdeteksi. Mereka menyatakan bahwa kolusi adalah perjanjian yang membohongi satu pihak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan pihak di luar organisasi ataupun antar pegawai dalam instansi atau organisasi. Selain itu, penelitian oleh Daresta dan Suryani (2021) menunjukkan bahwa faktor-faktor kolusi, seperti koneksi politik, transaksi dengan pihak terkait, dan keterlibatan badan usaha milik negara, berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Mereka menemukan bahwa kolusi dapat meningkatkan kompleksitas sistem dan mengurangi efektivitas kontrol internal, sehingga memudahkan terjadinya *fraud*.

Penelitian lain oleh Hidayat (2023) juga mendukung temuan ini, dengan menunjukkan bahwa kolusi berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolusi dapat meningkatkan peluang terjadinya *fraud* dengan menciptakan situasi di mana individu memiliki kesempatan lebih besar untuk menghindari deteksi. Dengan demikian, bukti empiris menunjukkan bahwa kolusi dalam organisasi dapat meningkatkan risiko terjadinya *fraud*. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk mengidentifikasi dan mengelola kolusi guna mencegah praktik *fraud*. Berdasarkan penjelasan ini, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H3: Kolusi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fraud*.

2.3.4. Pengaruh Kesempatan terhadap *Fraud*

Dalam konteks *fraud*, kesempatan merujuk pada peluang yang dimiliki individu untuk melakukan *fraud* tanpa terdeteksi oleh sistem kontrol yang ada. Menurut teori *Hexagon Fraud*, kesempatan adalah salah satu elemen kunci yang dapat memicu terjadinya *fraud*, dan sering kali muncul ketika pengendalian internal dalam suatu organisasi lemah (Vousinas, 2019). Kesempatan untuk melakukan *fraud* biasanya terjadi ketika ada kelemahan dalam sistem pengendalian internal,

pengawasan manajerial yang tidak efektif, kegagalan dalam penerapan prosedur yang memadai, atau penyelewengan wewenang.

Teori atribusi menjelaskan bahwa individu cenderung memberikan atribusi pada faktor eksternal ketika mereka melakukan tindakan tertentu. Dalam hal ini, individu yang melakukan *fraud* mungkin mengaitkan tindakan mereka dengan adanya kesempatan yang memadai untuk melakukan *fraud*, serta kurangnya pengawasan atau kontrol yang ketat. Kesempatan yang diperoleh dari kelemahan dalam pengendalian internal dapat membuat individu merasa bahwa tindakan *fraud* tidak akan terdeteksi, sehingga mereka mungkin merasionalisasi tindakan mereka sebagai sesuatu yang wajar atau tidak dapat dihindari.

Beberapa penelitian empiris mendukung hipotesis bahwa kesempatan berpengaruh signifikan terhadap terjadinya *fraud* dalam organisasi. Misalnya, penelitian oleh Suryandari et al. (2019) menemukan bahwa kesempatan berpengaruh positif terhadap terjadinya *fraud* di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) se-Kecamatan Negara. Mereka menyatakan bahwa kesempatan berpengaruh positif terhadap kecenderungan terjadinya *fraud*. Selain itu, Lestari, Sujana, dan Julianto (2017) menemukan bahwa kesempatan berpengaruh positif terhadap kecenderungan terjadinya *fraud*.

Budiantari et al. (2017) menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal yang efektif dapat mengurangi kemungkinan terjadinya *fraud*. Pengendalian internal yang baik termasuk adanya prosedur yang memadai untuk memantau dan mengendalikan kegiatan, sistem audit internal, dan pengawasan manajerial yang ketat. Jika sistem pengendalian internal diterapkan dengan baik, maka kesempatan untuk melakukan *fraud* menjadi lebih kecil karena adanya pengawasan dan kontrol yang mengurangi peluang individu untuk mengeksploitasi celah dalam sistem. Dengan mempertimbangkan teori atribusi dan peran kesempatan dalam *fraud*, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H4: Kesempatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fraud*.

2.3.5. Pengaruh Rasionalisasi terhadap *Fraud*

Rasionalisasi adalah proses mental di mana pelaku *fraud* mencari alasan atau pembenaran untuk tindakan curang yang mereka lakukan. Dalam teori *Triangle Fraud* yang dikemukakan oleh Cressey (1953), rasionalisasi adalah salah satu faktor kunci yang memungkinkan individu untuk melakukan *fraud* dengan merasionalisasi tindakan mereka sebagai sesuatu yang tidak sepenuhnya salah atau sebagai sesuatu yang dapat diterima dalam konteks tertentu. Rasionalisasi seringkali dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya yang dapat membuat tindakan *fraud* tampak lebih wajar atau dapat diterima.

Teori atribusi menjelaskan bagaimana individu membuat penilaian tentang penyebab perilaku mereka dan orang lain. Dalam konteks *fraud*, rasionalisasi melibatkan atribusi internal di mana pelaku mengaitkan tindakan *fraud* dengan situasi yang mereka anggap sebagai pembenaran atau hak mereka. Pelaku mungkin atribusi tindakan mereka sebagai respons terhadap ketidakadilan, perlakuan yang tidak adil, atau kondisi yang dianggap memaksa mereka untuk bertindak secara curang. Mereka mungkin percaya bahwa tindakan *fraud* adalah cara untuk mendapatkan apa yang mereka anggap sebagai hak mereka atau untuk memperbaiki ketidakadilan yang mereka rasakan.

Sebuah studi oleh Sari et al. (2023) menunjukkan bahwa rasionalisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Penelitian ini menyoroti bahwa faktor rasionalisasi dapat mempengaruhi individu dalam melakukan pembenaran terhadap tindakan *fraud* yang mereka lakukan. Selain itu, penelitian oleh Noviyanti dan Adityawarman (2023) menemukan bahwa rasionalisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan *fraud* pada aparatur sipil negara di Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa individu yang memiliki kemampuan untuk merasionalisasi tindakan *fraud* cenderung lebih terlibat dalam kecurangan. Penelitian oleh Isu et al. (2023) juga mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa rasionalisasi berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan

keuangan. Mereka menyatakan bahwa rasionalisasi dapat mempengaruhi individu dalam melakukan pembenaran terhadap tindakan *fraud* yang mereka lakukan.

Temuan-temuan tersebut konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh Wijayanti dan Hanafi (2018) yang menunjukkan bahwa rasionalisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *fraud*. Hal ini berarti bahwa semakin besar kemampuan individu untuk merasionalisasi tindakan *fraud*, semakin besar kemungkinan mereka akan terlibat dalam tindakan tersebut.

Berdasarkan penjelasan ini, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H5: Rasionalisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fraud*.

2.3.6. Pengaruh Egoisme terhadap *Fraud*

Egoisme, atau sikap superioritas, merujuk pada keyakinan bahwa seseorang lebih tinggi kedudukannya dibandingkan orang lain, sehingga aturan dan pengendalian internal tidak berlaku untuk dirinya sendiri. Sikap ini sering kali menyebabkan individu merasa memiliki hak untuk melanggar aturan dan mengambil keuntungan secara curang. Dalam konteks *fraud*, egoisme berhubungan dengan rasa superioritas dan keyakinan bahwa tindakan curang tidak akan terdeteksi atau akan dianggap wajar oleh individu tersebut.

Menurut teori atribusi, individu yang memiliki egoisme mungkin memberikan atribusi internal terhadap perilaku mereka. Mereka mungkin percaya bahwa mereka memiliki hak atau kemampuan khusus yang membenarkan tindakan *fraud*. Misalnya, mereka mungkin menganggap bahwa karena posisi mereka yang tinggi atau keahlian mereka, mereka memiliki hak untuk mengeksploitasi celah dalam sistem tanpa konsekuensi yang berarti. Sikap superioritas ini mempengaruhi cara mereka memandang aturan dan pengendalian internal, menjadikan mereka lebih cenderung untuk mengabaikan atau meremehkan aturan tersebut.

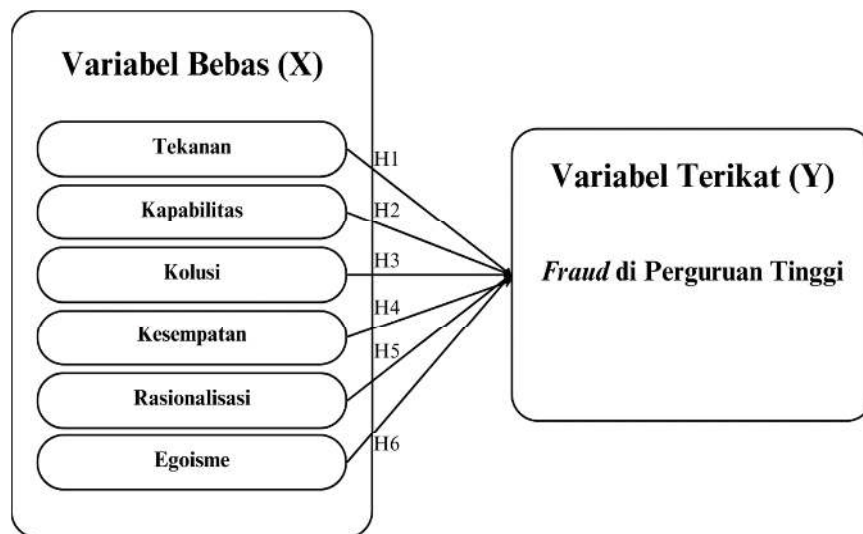
Penelitian oleh Dewi et al. (2017) menunjukkan bahwa egoisme memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *fraud*. Hal ini berarti bahwa semakin besar rasa superioritas atau egoisme seseorang, semakin besar kemungkinan

mereka untuk terlibat dalam tindakan *fraud*. Wahyuni (2017) juga mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa egoisme memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *fraud*, menunjukkan bahwa sikap superioritas ini berperan penting dalam keputusan individu untuk melakukan tindakan *fraud*. Egoisme memberikan individu rasa percaya diri yang berlebihan, yang memungkinkan mereka untuk merasionalisasi tindakan mereka sebagai sesuatu yang dapat diterima atau diperlukan. Berdasarkan penjelasan ini, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H6: Egoisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fraud*.

2.4. Kerangka Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud* di perguruan tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh Gambar 2, dimana variabel bebas yang terdiri dari tekanan, kapabilitas, kolusi, kesempatan, rasionalisasi, dan egoisme diasumsikan memiliki hubungan signifikan terhadap variabel terikat, yaitu *fraud* di perguruan tinggi.



Gambar 2. Kerangka Penelitian

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian kuantitatif berfokus pada pengumpulan dan analisis data numerik untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya (Creswell, 2014). Penelitian ini bersifat deskriptif dan kausal. Pada aspek deskriptif, penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran yang rinci tentang variabel-variabel yang diteliti, seperti persepsi pimpinan, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan satuan pengendalian internal di perguruan tinggi. Sementara itu, pada aspek kausal, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menguji hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel tersebut. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana elemen "*Hexagon Fraud*" mempengaruhi terjadinya *fraud* di Perguruan Tinggi di Lampung.

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang berada di wilayah Lampung dengan total keseluruhan 71 perguruan tinggi. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai situasi dan kondisi di berbagai institusi pendidikan tinggi, baik negeri maupun swasta. Untuk sampel penelitian ini akan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria, yaitu perguruan tinggi yang akan menjadi objek merupakan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Lampung yang telah menjadi Universitas dan telah terakreditasi dengan minimal nilai B/Baik, karena akreditasi dianggap sebagai indikator kualitas institusi dan relevansi dalam penelitian. Setelah dilakukan proses penyaringan sesuai kriteria didapatkan jumlah perguruan tinggi sebanyak 9 Universitas Swasta

dan 2 Universitas Negeri. Universitas Swasta terdiri dari Universitas Muhammadiyah Metro, Universitas Teknokrat Indonesia, Universitas Aisyah Pringsewu, Universitas Saburai, Universitas Nahdlatul Ulama Lampung, Universitas Bandar Lampung, Universitas Malahayati, Universitas Mitra Indonesia, dan Universitas Muhammadiyah Lampung. Sedangkan Universitas Negeri terdiri dari Universitas Lampung dan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dengan demikian populasi pada penelitian ini adalah seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi.

Tabel 3. Pemilihan Sampel Penelitian

Kriteria	Jumlah
Jumlah Perguruan Tinggi di Lampung	71
Yang sudah menjadi Universitas	16
Yang sudah terakreditasi minimal B/Baik	11
Jumlah Sampel	11

Sumber data: diolah (2025)

3.3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer sebagai jenis dan sumber datanya. Data primer diperoleh langsung dari responden yang memenuhi kriteria responden. Pemilihan kriteria responden dalam penelitian ini didasarkan pada posisi strategis para pimpinan di perguruan tinggi, yang meliputi Rektor, Wakil Rektor, Kepala Biro (Kabiros), Kepala Bagian (Kabag), Kepala Sub Bagian (Kasubag), Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Tenaga Pendidik (Dosen), Tenaga Kependidikan (Staf), dan Satuan Pengendalian Internal. Kriteria ini dipilih karena individu dalam posisi tersebut memiliki wawasan mendalam, tanggung jawab, serta akses terhadap informasi yang relevan mengenai sistem tata kelola, pengendalian internal, dan praktik operasional di universitas. Dengan demikian, mereka dianggap memiliki pengetahuan yang cukup untuk memberikan data yang

signifikan terkait elemen-elemen *hexagon fraud* dalam konteks institusi pendidikan tinggi. Kriteria ini digunakan untuk memastikan bahwa responden yang diambil sesuai dengan tujuan penelitian, yakni menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi potensi atau kejadian *fraud* di perguruan tinggi. Pendekatan ini dirancang agar data yang diperoleh memiliki relevansi tinggi, mencerminkan kompleksitas, dan memberikan gambaran yang komprehensif tentang potensi *fraud* di universitas. Kuisisioner pada penelitian ini menggunakan skala Likert 1–5, di mana responden diminta untuk memberikan penilaian berdasarkan tingkat persetujuan mereka terhadap pernyataan yang diajukan, dengan nilai 1 menunjukkan "sangat tidak setuju" dan nilai 5 menunjukkan "sangat setuju". Teknik ini digunakan untuk mengukur persepsi secara kuantitatif terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan *hexagon fraud*, seperti tekanan, kapabilitas, kolusi, kesempatan, rasionalisasi, dan egoism.

Penggunaan skala Likert memungkinkan peneliti untuk menganalisis data dengan metode statistik guna mendapatkan hasil yang valid dan dapat diandalkan. Dengan fokus pada responden yang memiliki tanggung jawab dan akses terhadap informasi penting dalam sistem tata kelola universitas, data yang dikumpulkan melalui kuisisioner diharapkan mencerminkan perspektif yang komprehensif dan relevan terhadap topik penelitian. Kombinasi antara teknik *purposive sampling*, pengukuran dengan skala Likert, dan penyebaran kuisisioner memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki kualitas yang tinggi untuk analisis mendalam. Dalam penelitian ini, kuisisioner disebar dengan metode snowball melalui *Google Form*. Penggunaan *Google Form* memungkinkan responden yang akrab dengan teknologi untuk mengisi kuisisioner kapan saja dan di mana saja. Selain itu, penyebaran melalui *Google Form* juga lebih hemat waktu dan biaya karena data langsung tersimpan secara digital. Dengan menggunakan ini, penelitian diharapkan dapat menjangkau lebih banyak responden, mengurangi risiko bias, dan memastikan data yang terkumpul lebih lengkap dan representatif.

3.4. Variabel Penelitian

3.4.1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *fraud*, yang dalam penulisan disingkat sebagai Y. *Fraud* merupakan tindakan yang melanggar hukum dan dilakukan dengan sengaja untuk mencapai tujuan tertentu, seperti manipulasi atau penyajian informasi yang salah kepada pihak lain. Tindakan ini dapat dilakukan oleh individu baik dari dalam maupun luar organisasi, dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, yang dapat merugikan pihak lain secara langsung atau tidak langsung. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan menggunakan kuisisioner yang menggunakan Skala Likert 1-5, di mana responden diminta untuk menilai tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan mereka terhadap berbagai pernyataan yang relevan dengan topik penelitian. Nilai 1 menunjukkan ketidaksetujuan mereka terhadap pernyataan di dalam kuisisioner hingga mencapai nilai 5 atau semakin setuju dengan pernyataan yang ada. Semakin tinggi nilai yang diperoleh atau semakin setuju responden dengan pernyataan di dalam kuisisioner, maka semakin tinggi *fraud* yang terjadi di perguruan tinggi. Untuk mengukur variabel dependen ini, penelitian menggunakan 3 instrumen yang telah dikembangkan (ACFE, 2018), yaitu:

Tabel 4. Dimensi dan Indikator variabel *Fraud*

Dimensi	Indikator
Kecurangan laporan keuangan	Pemalsuan atau manipulasi laporan keuangan
Penyalahgunaan aset	Penggunaan aset organisasi untuk kepentingan pribadi
Korupsi	Penerimaan suap, gratifikasi, atau nepotisme dalam pengambilan keputusan

Sumber data: ACFE (2018)

3.4.2. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah tekanan, kapabilitas, kolusi, kesempatan, rasionalisasi, dan egoisme.

3.4.2.1. Tekanan

Tekanan merupakan dorongan untuk melakukan *fraud* yang dapat berupa tekanan keuangan maupun tekanan non keuangan, seperti tekanan politik dan tekanan sosial (Vousinas, 2019). Vousinas menjelaskan bahwa tekanan-tekanan ini dapat berupa tekanan akan kebutuhan keuangan yang tinggi, frustrasi akibat lingkungan kerja yang kurang sesuai, tingginya target yang harus dicapai, atau tekanan untuk mencapai posisi tertentu dengan waktu secepat mungkin. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan menggunakan kuisioner yang menggunakan Skala Likert 1-5, di mana responden diminta untuk menilai tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan mereka terhadap berbagai pernyataan yang relevan dengan topik penelitian. Nilai 1 menunjukkan ketidaksetujuan mereka terhadap pernyataan di dalam kuisioner hingga mencapai nilai 5 atau semakin setuju dengan pernyataan yang ada. Semakin tinggi nilai yang diperoleh atau semakin setuju responden dengan pernyataan di dalam kuisioner, maka semakin tinggi tekanan yang mereka rasakan di perguruan tinggi. Terdapat 5 indikator yang akan digunakan untuk mengukur pengaruh tekanan terhadap *fraud* (Albrecht, et al., 2019), yaitu:

Tabel 5. Dimensi dan Indikator variabel Tekanan

Dimensi	Indikator
Tekanan keuangan	Masalah keuangan pribadi
Kebiasaan buruk	Gaya hidup konsumtif
Tekanan pekerjaan	Beban kerja tinggi atau target tidak realistis
Hedonisme	Keinginan hidup mewah
<i>Love of money</i>	Mengutamakan uang di atas segalanya

Sumber data: Albrecht, et al. (2019)

3.4.2.2. Kapabilitas

Kapabilitas merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali peluang dan memanfaatkannya secara berulang (Wolfe dan Hermanson, 2004). Kasus *fraud* terkait kecurangan pada laporan keuangan dalam jumlah besar tidak terjadi tanpa adanya orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, kapabilitas merujuk pada sifat dan kemampuan seseorang yang memainkan peran utama apakah *fraud* tersebut akan terjadi (Vousinas, 2019). Orang yang mampu melakukan *fraud* harus memiliki pemahaman dan mampu memanfaatkan kelemahan internal kontrol, serta dapat menggunakan posisi, fungsi, atau akses yang dia miliki untuk mendapatkan tujuan pribadinya. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan menggunakan kuisioner yang menggunakan Skala Likert 1-5, di mana responden diminta untuk menilai tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan mereka terhadap berbagai pernyataan yang relevan dengan topik penelitian. Nilai 1 menunjukkan ketidaksetujuan mereka terhadap pernyataan di dalam kuisioner hingga mencapai nilai 5 atau semakin setuju dengan pernyataan yang ada. Semakin tinggi nilai yang diperoleh atau semakin setuju responden dengan pernyataan di dalam kuisioner, maka semakin tinggi kapabilitas mereka dalam menyelesaikan pekerjaannya. Terdapat 3 indikator yang akan digunakan untuk mengukur kapabilitas (Vousinas, 2019), yaitu:

Tabel 6. Dimensi dan Indikator variabel Kapabilitas

Dimensi	Indikator
Pengetahuan	Memahami sistem dan celahnya
Kemampuan	Mampu memanfaatkan kelemahan sistem
Sikap (<i>attitude</i>)	Percaya diri melakukan <i>fraud</i> tanpa takut tertangkap

Sumber data: Vousinas (2019)

3.4.2.3. Kolusi

Fraud terjadi disebabkan oleh faktor kolusi, di mana terjadi kesepakatan atau kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan kejahatan atau penipuan (Vousinas, 2019). Pihak yang terlibat bisa sesama karyawan maupun antara karyawan dengan pihak luar. Dalam risetnya, dikemukakan bahwa Bank Dunia melaporkan bahwa kolusi menyumbang 11% dari keseluruhan kasus *fraud* yang terjadi antara tahun 2013 hingga 2016 dan terus meningkat hingga 22% pada tahun 2017, serta adanya kolusi dalam kasus *fraud* akan meningkatkan kerugian yang terjadi. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan menggunakan kuisioner yang menggunakan Skala Likert 1-5, di mana responden diminta untuk menilai tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan mereka terhadap berbagai pernyataan yang relevan dengan topik penelitian. Nilai 1 menunjukkan ketidaksetujuan mereka terhadap pernyataan di dalam kuisioner hingga mencapai nilai 5 atau semakin setuju dengan pernyataan yang ada. Semakin tinggi nilai yang diperoleh atau semakin setuju responden dengan pernyataan di dalam kuisioner, maka semakin tinggi kolusi yang terjadi di perguruan tinggi. Terdapat 4 indikator untuk mengukur kolusi (Vousinas, 2019), antara lain:

Tabel 7. Dimensi dan Indikator variabel Kolusi

Dimensi	Indikator
Penyalahgunaan posisi	Menyalahgunakan jabatan untuk keuntungan pribadi
Penyalahgunaan sumber daya	Memanfaatkan fasilitas organisasi untuk kepentingan pribadi
Penyalahgunaan kekuasaan	Menekan bawahan agar mengikuti skema <i>fraud</i>
Tidak ada tindakan	Membiarkan tindakan <i>fraud</i> karena hubungan dekat

Sumber data: Vousinas (2019)

3.4.2.4. Kesempatan

Kesempatan merupakan peluang untuk melakukan *fraud* tanpa terdeteksi (Vousinas, 2019). Hal ini dapat terjadi akibat kedudukan atau wewenang yang

dimiliki seseorang di dalam organisasi. Kesempatan merupakan akar dari terjadinya tindakan *fraud*. Sudah selayaknya organisasi mampu untuk melakukan tindakan pencegahan dengan adanya mitigasi risiko dan sistem pengendalian internal di dalamnya. Akan tetapi, sering kali tanda-tanda akan terjadinya *fraud* di dalam organisasi diabaikan. Oleh karena itu, sangat penting bagi organisasi untuk fokus pada resiko yang dapat dikendalikan, sesuai dengan mitigasi “*opportunity risk*”, sehingga system pengendalian internal menjadi strategi pencegahan dan deteksi menyeluruh. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan menggunakan kuisioner yang menggunakan Skala Likert 1-5, di mana responden diminta untuk menilai tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan mereka terhadap berbagai pernyataan yang relevan dengan topik penelitian. Nilai 1 menunjukkan ketidaksetujuan mereka terhadap pernyataan di dalam kuisioner hingga mencapai nilai 5 atau semakin setuju dengan pernyataan yang ada. Semakin tinggi nilai yang diperoleh atau semakin setuju responden dengan pernyataan di dalam kuisioner, maka semakin tinggi kesempatan mereka untuk melakukan *fraud* di perguruan tinggi. Terdapat 6 indikator untuk mengukur kesempatan (Albrecht, et al., 2019), yaitu:

Tabel 8. Dimensi dan Indikator variabel Kesempatan

Dimensi	Indikator
Lemahnya pengendalian internal	Tidak adanya SOP yang jelas
Ketidakmampuan menilai kualitas kerja	Evaluasi kinerja yang lemah
Gagal membina pelaku <i>fraud</i>	Tidak ada sanksi atau tindakan tegas
Kurangnya akses informasi	Transparansi informasi rendah
Apatisme dan ketidaktahuan pihak dirugikan	Pihak terkait tidak menyadari kerugian
Kurangnya pemeriksaan	Audit atau pengawasan internal jarang dilakukan

Sumber data: Albrecht, et al. (2019)

3.4.2.5. Rasionalisasi

Rasionalisasi berkaitan dengan tindakan pembenaran atas tindakan *fraud*. Pelaku kejahatan umumnya merasionalisasi tindakan mereka bukan sebagai kejahatan, dapat dibenarkan, atau bukan sepenuhnya tanggung jawab mereka (Cressey, 1953). Rasionalisasi berkaitan dengan membenarkan penipuan dengan memunculkan berbagai alasan agar tindakannya dapat lebih diterima (Vousinas, 2019). Rasionalisasi memungkinkan pelakunya untuk memahami tindakan ilegalnya, dan membentuk konsep diri sebagai pribadi yang dapat dipercaya guna mempertahankan diri. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan menggunakan kuisiонер yang menggunakan Skala Likert 1-5, di mana responden diminta untuk menilai tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan mereka terhadap berbagai pernyataan yang relevan dengan topik penelitian. Nilai 1 menunjukkan ketidaksetujuan mereka terhadap pernyataan di dalam kuisiонер hingga mencapai nilai 5 atau semakin setuju dengan pernyataan yang ada. Semakin tinggi nilai yang diperoleh atau semakin setuju responden dengan pernyataan di dalam kuisiонер, maka semakin mereka membenarkan tindakan mereka dalam melakukan *fraud* di perguruan tinggi. Terdapat 5 indikator rasionalisasi (Albrecht, et al., 2019), yaitu:

Tabel 9. Dimensi dan Indikator variabel Rasionalisasi

Dimensi	Indikator
Pembenaran moral	Merasa memiliki hak atas aset organisasi
Pembenaran situasional	Menganggap hanya meminjam, akan dikembalikan
Tidak ada pihak dirugikan	Berpikir tidak ada yang merasa dirugikan
Keadilan personal	Merasa pantas mendapat lebih dari organisasi
Tujuan baik	Melakukan <i>fraud</i> demi alasan "kebaikan" tertentu

Sumber data: Albrecht, et al. (2019)

3.4.2.6. Egoisme

Egoisme merupakan hasil interaksi antara apa yang dilakukan oleh hati nuraninya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Seseorang harus memiliki egoisme yang kuat agar mampu dan berkeyakinan dalam melakukan tindakan *fraud* (Vousinas, 2019). Banyak kasus *fraud* terjadi akibat dari rasa superioritas, penguasaan, dan kekaguman orang lain. Dengan kata lain, pelaku *fraud* merasakan kesenangan ketika mereka berhasil menjalankan rencana mereka dan merasa berhasil membodohi sistem atau orang lain. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan menggunakan kuisioner yang menggunakan Skala Likert 1-5, di mana responden diminta untuk menilai tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan mereka terhadap berbagai pernyataan yang relevan dengan topik penelitian. Nilai 1 menunjukkan ketidaksetujuan mereka terhadap pernyataan di dalam kuisioner hingga mencapai nilai 5 atau semakin setuju dengan pernyataan yang ada. Semakin tinggi nilai yang diperoleh atau semakin setuju responden dengan pernyataan di dalam kuisioner, maka semakin ego mereka mendorong tindakan *fraud* terjadi di perguruan tinggi. Terdapat 6 indikator untuk mengukur egoisme (Howarth, 2011), antara lain:

Tabel 10. Dimensi dan Indikator variabel Egoisme

Dimensi	Indikator
Superioritas diri	Ego yang besar
Penolakan terhadap aturan	Merasa aturan tidak berlaku untuk dirinya
Kepemimpinan otoriter	Menggunakan jabatan untuk memaksakan kehendak
Ketakutan kehilangan status	Bertindak curang agar tidak kehilangan posisi
<i>Machiavellianism</i>	Menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan
Narsistik	Merasa paling penting dan tak tergantikan

Sumber data: diolah Howarth (2011)

Berikut tabel definisi operasional dari masing-masing variabel dependen dan independen dalam penelitian ini.

Tabel 11. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Dimensi	Skala	Nomor Pertanyaan
<i>Fraud</i> (Y)	<i>Fraud</i> merupakan tindakan yang disengaja dan direncanakan demi keuntungan diri sendiri atau kelompok-nya dan menyebabkan kerugian bagi pihak lain.	1. Kecurangan laporan keuangan 2. Penyalahgunaan aset 3. Korupsi	1. Pemalsuan atau manipulasi laporan keuangan 2. Penggunaan aset organisasi untuk kepentingan pribadi 3. Penerimaan suap, gratifikasi, atau nepotisme dalam pengambilan keputusan	1-7 Sumber: Dani et al. (2022)
Tekanan (X1)	Tekanan merupakan dorongan yang timbul baik akibat masalah keuangan maupun non keuangan yang tidak dapat diceritakan.	1. Tekanan keuangan 2. Kebiasaan buruk 3. Tekanan pekerjaan 4. Hedonisme 5. <i>Love of money</i>	1. Masalah keuangan pribadi 2. Gaya hidup konsumtif 3. Beban kerja tinggi atau target tidak realistis 4. Keinginan hidup mewah 5. Mengutamakan uang di atas segalanya	8-12 Sumber: Dani et al. (2022)
Kapabilitas (X2)	Kapabilitas merupakan kompetensi yang dimiliki seseorang untuk mengesampingkan kontrol internal, melakukan penyembunyian, dan mengendalikannya situasi sosial untuk mencapai tujuannya.	1. Pengetahuan 2. Kemampuan 3. Sikap (<i>attitude</i>)	1. Memahami sistem dan celahnya 2. Mampu memanfaatkan kelemahan sistem 3. Percaya diri melakukan <i>fraud</i> tanpa takut tertangkap	13-15 Sumber: Dani et al. (2022)
Kolusi (X3)	Kolusi merupakan Kerjasama yang dilakukan oleh beberapa pihak baik internal maupun	1. Penyalahgunaan posisi 2. Penyalahgunaan sumber daya	1. Menyalahgunakan jabatan untuk keuntungan pribadi 2. Memanfaatkan fasilitas organisasi untuk kepentingan pribadi	16-19

	eksternal demi mencari keuntungan pribadi atau kelompoknya.	3. Penyalahgunaan kekuasaan 4. Tidak ada tindakan	3. Menekan bawahan agar mengikuti skema <i>fraud</i> 4. Membiarkan tindakan <i>fraud</i> karena hubungan dekat	Sumber: Pura et al. (2025)
Kesempatan (X4)	Kesempatan merupakan peluang untuk melakukan <i>fraud</i> akibat lemahnya tata kelola organisasi dan sistem pengendalian internal.	1. Lemahnya pengendalian internal 2. Ketidakmampuan menilai kualitas kerja 3. Gagal membina pelaku <i>fraud</i> 4. Kurangnya akses informasi 5. Apatisme dan ketidaktahuan pihak dirugikan 6. Kurangnya pemeriksaan	1. Tidak adanya SOP yang jelas 2. Evaluasi kinerja yang lemah 3. Tidak ada sanksi atau tindakan tegas 4. Transparansi informasi rendah 5. Pihak terkait tidak menyadari kerugian 6. Audit atau pengawasan internal jarang dilakukan	20-25 Sumber: Dani et al. (2022)
Rasionalisasi (X5)	Rasionalisasi merupakan tindakan pembenaran atas tindakan <i>fraud</i> yang dilakukan.	1. Pembenaran moral 2. Pembenaran situasional 3. Tidak ada pihak dirugikan 4. Keadilan personal 5. Tujuan baik	1. Merasa memiliki hak atas aset organisasi 2. Menganggap hanya meminjam, akan dikembalikan 3. Berpikir tidak ada yang merasa dirugikan 4. Merasa pantas mendapat lebih dari organisasi 5. Melakukan <i>fraud</i> demi alasan "kebaikan" tertentu	26-30 Sumber: Dani et al. (2022)
Egoisme (X6)	Egoisme merupakan sikap superioritas atas hak yang dimiliki dan merasa bahwa kontrol internal atau kebijakan organisasi tidak berlaku	1. Superioritas diri 2. Penolakan terhadap aturan 3. Kepemimpinan otoriter 4. Ketakutan kehilangan status 5. <i>Machiavellia-</i>	1. Ego yang besar 2. Merasa aturan tidak berlaku untuk dirinya 3. Menggunakan jabatan untuk memaksakan kehendak 4. Bertindak curang agar tidak kehilangan posisi 5. Menghalalkan segala cara untuk mencapai	31-36

untuknya.	<i>nism</i>	tujuan	Sumber:
	6. Narsistik	6. Merasa paling penting dan tak tergantikan	Dani et al. (2022)

Sumber data: diolah (2025)

3.5. Analisis Data

Pada penelitian ini, analisis data menggunakan pendekatan *Partial Least Squares* (PLS), yang merupakan model persamaan *Structural Equation Modeling* (SEM) yang berbasis komponen atau varian. PLS adalah pendekatan alternatif dalam SEM yang lebih fokus pada prediksi dibandingkan pengujian kualitas teori secara mendalam seperti pada SEM kovarian umumnya. PLS dianggap *powerfull* karena tidak terlalu bergantung pada asumsi-asumsi yang ketat. Metode ini memungkinkan penggunaan data dengan distribusi yang tidak normal secara multivariat, dan dapat menangani indikator dengan skala kategori, ordinal, interval, hingga ratio dalam satu model analisis. PLS tidak memerlukan sampel besar untuk analisis yang efektif. Selain digunakan untuk mengkonfirmasi teori, PLS juga mampu menjelaskan hubungan antar variabel laten serta menganalisis konstruk yang dibentuk baik dengan indikator reflektif maupun formatif.

3.5.1. Analisis *Outer Model*

Analisis *Outer Model* dalam penelitian sering dilakukan melalui uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan dapat diandalkan dan sesuai dengan tujuan penelitian (Hair et al., 2012). Berikut ini adalah penjelasan singkat tentang kedua konsep tersebut:

3.5.1.1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa isi kuisioner atau alat pengukuran lainnya cukup tepat untuk mengukur variabel atau konstruk yang diinginkan, serta dipahami dengan baik oleh responden. Dalam analisis *Partial*

Least Squares (PLS), validitas dapat dinilai melalui validitas konvergen (*convergent validity*) dan validitas diskriminan (*discriminant validity*). Validitas konvergen dinilai berdasarkan besarnya nilai loading (beban faktor) antara setiap item dalam alat pengukuran dengan skor konstruk yang dimaksud. Nilai loading yang tinggi menunjukkan bahwa item-item tersebut mempunyai korelasi yang kuat dengan konstruk yang ingin diukur. Biasanya, nilai loading reflektif dianggap tinggi jika lebih dari 0,70. Namun, dalam tahap awal penelitian, nilai loading antara 0,50 hingga 0,60 juga dianggap cukup untuk menunjukkan adanya hubungan yang memadai antara item-item dengan konstruk yang sama.

Dalam konteks penelitian ini, nilai *loading* > 0,50 dianggap sudah cukup baik untuk menunjukkan adanya validitas konvergen. *Average Variance Extracted* (AVE) mengukur seberapa banyak *varians* dari item-item yang terkait dengan konstruk yang diukur. Jika nilai AVE > 0,50, ini menunjukkan bahwa konstruk tersebut memiliki validitas konvergen yang baik. Artinya, lebih dari setengah *varians* dari item-item terkait dapat dijelaskan oleh konstruk yang diukur. AVE merupakan indikator penting untuk mengukur sejauh mana item-item dalam konstruk mampu mencerminkan konstruk secara keseluruhan. Dengan melakukan uji validitas yang komprehensif, peneliti dapat memastikan bahwa alat pengukuran yang digunakan memenuhi standar untuk mengukur variabel atau konstruk yang diteliti. Hal ini penting untuk memastikan keabsahan dan keandalan hasil analisis yang akan dilakukan selanjutnya.

3.5.1.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai sejauh mana konsistensi atau keandalan dari alat pengukur yang digunakan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa jika alat pengukur tersebut digunakan kembali pada penelitian yang sama dengan obyek dan teknik yang serupa dalam waktu yang berbeda, maka hasil yang diperoleh akan konsisten. Dalam konteks ini, terdapat dua metode yang umum digunakan untuk mengukur reliabilitas alat pengukur. *Composite Reliability Measure* (CRM) mengukur keandalan konstruk dari alat pengukur

yang dibuat dari beberapa item. Nilai CRM dianggap baik jika lebih dari 0,70. Nilai ini menunjukkan seberapa baik item-item dalam konstruk mampu mengukur konstruk secara konsisten. *Cronbach's Alpha* juga merupakan ukuran keandalan internal atau konsistensi dari alat pengukur. Nilai *Cronbach's Alpha* yang baik biasanya juga lebih dari 0,70. Alpha ini mengukur sejauh mana item-item dalam alat pengukur saling terkait satu sama lain dalam mengukur variabel atau konstruk yang sama. Kedua ukuran ini penting untuk memastikan bahwa alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan untuk menghasilkan data yang konsisten dan dapat dipercaya. Dengan demikian, peneliti dapat memiliki keyakinan yang lebih tinggi terhadap hasil analisis yang dilakukan berdasarkan alat pengukur tersebut.

3.5.2. Pengukuran Model Struktural

Model struktural digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik model yang telah dibangun dapat menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang ada. Dalam evaluasi model struktural, terdapat beberapa ukuran yang umum digunakan, yaitu uji kolinieritas, uji determinasi koefisien, dan uji koefisien jalur. Uji kolinearitas bertujuan untuk mendeteksi adanya hubungan yang sangat tinggi antar variabel independen dalam model, yang dapat menyebabkan distorsi dalam estimasi parameter dan mengurangi keakuratan hasil analisis. Kolinearitas dapat diuji dengan melihat *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk setiap variabel independen dalam model. Nilai VIF yang lebih tinggi dari 5 menunjukkan adanya masalah kolinearitas yang serius, sementara nilai antara 3 hingga 5 mengindikasikan kolinearitas moderat. ada masalah kolinearitas yang signifikan (Sarstedt et al., 2017).

Uji determinasi koefisien (R^2) digunakan untuk menilai seberapa besar variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Interpretasi R^2 mirip dengan interpretasi pada analisis regresi, dimana nilai R^2 yang lebih tinggi menunjukkan bahwa variabel independen memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap variabilitas variabel dependen. Uji koefisien jalur merupakan analisis untuk mengetahui besarnya pengaruh langsung masing-masing variabel

independen terhadap variabel dependen dalam model struktural. Dalam penelitian ini, koefisien jalur diperoleh melalui nilai *original sample (O)*, kemudian Pengujian hipotesis menggunakan SEM-PLS dengan melihat *P-value*.

V. KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kecenderungan *fraud* di lingkungan perguruan tinggi, ditemukan bahwa tidak semua variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap *fraud*. Dari enam variabel yang diuji, tiga variabel terbukti secara statistik berpengaruh signifikan terhadap *fraud*, yaitu kesempatan, kolusi, dan rasionalisasi. Sementara tiga variabel lainnya, yaitu tekanan, kapabilitas, dan egoisme, tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.

Variabel kesempatan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi *fraud*. Hasil ini sejalan dengan teori *Hexagon Fraud* yang menyatakan bahwa tanpa adanya kesempatan, individu yang memiliki tekanan dan rasionalisasi tidak akan mampu melakukan tindakan *fraud*. Lemahnya sistem pengendalian internal, kurangnya pemeriksaan, dan keterbatasan akses informasi menjadi celah yang dimanfaatkan untuk melakukan *fraud*. Dalam konteks perguruan tinggi, celah-celah ini dapat muncul dalam bentuk sistem keuangan yang tidak transparan atau lemahnya pengawasan terhadap penggunaan aset institusi.

Variabel kolusi juga ditemukan berpengaruh signifikan terhadap *fraud*. Hal ini mengindikasikan bahwa kerja sama antara pihak-pihak tertentu, baik dari dalam maupun luar institusi, untuk mencapai kepentingan pribadi dapat memperbesar kemungkinan terjadinya *fraud*. Kolusi melemahkan fungsi pengawasan dan menciptakan ruang yang lebih luas untuk terjadinya penyimpangan, sehingga meningkatkan risiko *fraud* secara sistemik. Hal ini menegaskan pentingnya

membangun budaya organisasi yang menolak kompromi terhadap tindakan kolusif serta memperkuat integritas antar pemangku kepentingan.

Selanjutnya, rasionalisasi juga menunjukkan pengaruh signifikan terhadap *fraud*. Ini mendukung kerangka teori *Hexagon Fraud* yang menekankan pentingnya aspek psikologis dalam membenarkan tindakan *fraud*. Dalam penelitian ini, individu yang mampu memberikan justifikasi moral atas perbuatan *fraud*, seperti merasa berhak atas keuntungan tertentu atau menganggap tindakan mereka tidak merugikan pihak lain, cenderung lebih mudah tergelincir ke dalam praktik *fraud*. Hal ini menunjukkan perlunya penanaman nilai etika secara berkelanjutan dalam lingkungan organisasi, terutama di sektor pendidikan.

Sementara itu, variabel tekanan, kapabilitas, dan egoisme tidak berpengaruh signifikan terhadap *fraud* dalam penelitian ini. Tidak berpengaruhnya tekanan menunjukkan bahwa meskipun seseorang menghadapi tekanan finansial, gaya hidup, atau tekanan pekerjaan, hal tersebut tidak serta-merta mendorongnya untuk melakukan *fraud* jika nilai moral dan sistem sosial di sekitarnya masih kuat. Demikian pula, kapabilitas yang mencerminkan kemampuan teknis dan pengetahuan individu tidak menjadi faktor kunci dalam mendorong *fraud* apabila tidak didukung oleh kesempatan dan justifikasi moral. Egoisme sebagai bentuk karakter individualistik juga tidak terbukti signifikan dalam konteks ini, kemungkinan karena struktur organisasi atau budaya akademik masih mampu menekan perilaku menyimpang berbasis superioritas individu.

Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian elemen dalam teori *Hexagon Fraud* terbukti berperan dalam mendorong terjadinya *fraud*, khususnya tiga faktor utama, yaitu kesempatan, rasionalisasi, dan kolusi. Dalam konteks perguruan tinggi, ketiga faktor ini terbukti lebih dominan dibandingkan faktor lainnya seperti tekanan, kapabilitas, dan egoisme. Artinya, *fraud* di lingkungan kampus lebih sering terjadi karena adanya peluang yang memungkinkan seseorang melakukan *fraud*, adanya pembenaran atas tindakan tersebut, serta keterlibatan pihak lain yang mendukung atau membiarkan *fraud*

terjadi. Oleh karena itu, langkah strategis yang paling tepat untuk meminimalkan risiko *fraud* di perguruan tinggi adalah dengan memperkuat tata kelola serta meningkatkan sistem pengawasan internal. Dengan sistem pengawasan yang ketat dan tata kelola yang baik, peluang untuk melakukan *fraud* dapat ditekan, sehingga potensi terjadinya kecurangan juga akan berkurang.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan untuk interpretasi hasil dan pengembangan penelitian selanjutnya:

1. Pemilihan Provinsi Lampung sebagai lokasi penelitian telah dilakukan berdasarkan pertimbangan metodologis yang tepat, sehingga data yang dihasilkan dapat dianggap valid dan relevan untuk menggambarkan kondisi di wilayah tersebut. Namun demikian, perlu dicatat bahwa adanya perbedaan budaya organisasi, sistem tata kelola, serta regulasi antar daerah dapat membatasi generalisasi temuan ini. Dengan kata lain, hasil penelitian ini lebih tepat untuk diterapkan dalam konteks lokal di Provinsi Lampung, dan belum tentu dapat mewakili kondisi di wilayah atau institusi pendidikan tinggi lainnya di Indonesia.
2. Penggunaan kuesioner sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data memberikan kontribusi yang besar terhadap kelengkapan informasi yang bersifat subjektif dari para responden. Namun, pendekatan ini juga memiliki keterbatasan, terutama karena data yang diperoleh cenderung merepresentasikan persepsi individu, bukan perilaku aktual. Meskipun dalam penelitian ini telah dilakukan sejumlah langkah antisipatif untuk meminimalkan potensi bias—seperti validasi instrumen, uji reliabilitas, serta penggunaan skala pengukuran yang telah teruji—kemungkinan adanya bias persepsi tetap tidak dapat dihilangkan sepenuhnya.
3. Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tiga variabel, yaitu tekanan, kapabilitas, dan egoisme, tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecenderungan terjadinya *fraud* di lingkungan perguruan tinggi. Salah satu kemungkinan penyebab dari ketidaksignifikanan ini adalah adanya

variabel lain yang belum diteliti dan berperan sebagai variabel moderator. Variabel-variabel tersebut berpotensi memengaruhi kekuatan atau arah hubungan antara variabel independen dan *fraud*, sehingga hubungan yang sebenarnya mungkin tidak tampak secara langsung dalam model struktural yang digunakan. Misalnya, faktor-faktor seperti budaya organisasi, tingkat kepuasan kerja, atau kepemimpinan etis dapat memperkuat atau justru melemahkan pengaruh tekanan dan egoisme terhadap *fraud*.

5.3. Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah diidentifikasi dalam penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya:

1. Penelitian di masa mendatang disarankan untuk melibatkan lebih dari satu wilayah atau provinsi, guna memperkaya variasi konteks budaya, tata kelola, dan regulasi institusional. Dengan melakukan studi komparatif antar daerah atau antar tipe perguruan tinggi (negeri dan swasta), peneliti selanjutnya dapat menguji apakah pola-pola yang ditemukan di Lampung juga berlaku secara lebih luas di wilayah lain, sehingga memungkinkan generalisasi temuan yang lebih kuat dan representatif secara nasional.
2. Penelitian mendatang disarankan untuk menggunakan variasi instrumen pengumpulan data yang lebih beragam guna memperoleh hasil yang lebih objektif. Selain kuesioner, peneliti dapat mempertimbangkan penggunaan observasi langsung, dokumentasi internal institusi, atau data audit sebagai sumber informasi tambahan. Pendekatan ini dapat memperkaya data yang dikumpulkan dan membantu meminimalisasi bias subjektivitas responden. Dengan begitu, hasil penelitian akan memiliki validitas yang lebih tinggi karena didasarkan pada kombinasi antara persepsi dan data empiris yang bersifat faktual.
3. Penelitian selanjutnya dapat memasukkan variabel-variabel moderator dalam model analisis. Faktor-faktor seperti budaya organisasi, tingkat religiusitas, kepemimpinan etis, kepuasan kerja, atau persepsi terhadap keadilan organisasi dapat digunakan untuk melihat apakah hubungan antara variabel independen dan *fraud* menjadi lebih jelas dalam kondisi tertentu. Selain itu, penelitian

lanjutan juga dapat mempertimbangkan teori-teori perilaku organisasi lainnya, seperti teori kontrol sosial, teori norma sosial, atau teori perilaku terencana, guna menguji apakah model teoretis lain mampu menjelaskan perilaku *fraud* dengan lebih baik dalam konteks perguruan tinggi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. (2022). Report to the Nations: 2022 Global Study on Occupational Fraud and Abuse. *Association of Certified Fraud Examiners*.
- ACFE Indonesia Chapter. (2019). Survei Fraud Indonesia 2019. *ACFE Indonesia*.
- ACFE Indonesia Chapter. (2023). Peta Risiko Fraud di Sektor Pendidikan.
- Anggara, M. D. (2023). ICW Catat dari Tahun 2006 hingga 2021 Ada 22 Perguruan Tinggi Terlibat Kasus Korupsi. *WartaKotaLive.com*.
<https://wartakota.tribunnews.com/2023/05/17/icw-catat-dari-tahun-2006-hingga-2021-ada-22-perguruan-tinggi-terlibat-kasus-korupsi>
- Anggraini, D., & Sari, A. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Fraud pada Perguruan Tinggi Negeri. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(2), 251–268.
- Budiartini, K., Dewi, G. A. R. S., & Herawati, N. T. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan akuntansi dalam perspektif fraud diamond (Studi Empiris pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 10(2).
- Cressey, D. R. (1953). Other People's Money: A Study of the Social Psychology of Embezzlement. *Free Press*.
- Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.). *SAGE Publications*.
- Christie, R., & Geis, F. L. (1970). Studies in Machiavellianism. *Academic Press*.
- Crowe, D. L. (2011). The fraud hexagon: An expansion of the fraud triangle and diamond. *Crowe Horwath LLP*.
- Dani, R. M., Mansor, N., Awang, Z., & Afthanorhan, A. (2022). A confirmatory factor analysis of the fraud pentagon instruments for measurement of fraud in the context of asset misappropriation in Malaysia. *Journal of Social Economics Research*, 9(2), 70–79.
- Daresta, T., & Suryani, E. (2021). Pengaruh faktor-faktor kolusi terhadap kecurangan laporan keuangan. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(2), 215–228.
- De Souza-Daw, T., & Ross, R. (2023). Fraud in higher education: A system for detection and prevention. *Journal of Engineering, Design and Technology*, 21(3), 637–654. <https://doi.org/10.1108/JEDT-12-2020-0504>

- Debora, E. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Melakukan Kecurangan Akademik Berdasarkan Perspektif Fraud Pentagon. *Universitas Kristen Satya Wacana*.
<https://repository.uksw.edu/handle/123456789/24856>
- Denisova-Schmidt, E. V. (2023). Academic Dishonesty at Russian Universities: A Historical Overview. *World of Russia*, 32(1), 159–181.
<https://doi.org/10.17323/1811-038X-2023-32-1-159-181>
- Desviana, R., Kusumo, H., & Suryani, E. (2020). Fraud Hexagon Theory dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 11(1), 45–66.
- Dewi, L. P. D. C., Utama, I. M., & Santoso, I. M. (2020). Pengaruh Keefektifan Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Asimetri Informasi, Dan Keadilan Distributif Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Pada BUMDes Se-Kecamatan Gerokgak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 11(3), 618–629.
- Duerrenberger, N., & Warning, S. (2018). Corruption and education in developing countries: The role of public vs. private funding of higher education. *International Journal of Educational Development*, 62, 217–225.
<https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2018.05.002>
- Egita, E., & Mahfiro, S. (2018). Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Reward and Punishment dan Religiusitas Terhadap Fraud (Studi pada Karyawan BMT di Kabupaten Wonosobo). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga (JEBA)*, 20(4), 1–23.
- Fitriyah, L., & Haryanto, H. (2019). Pengaruh tekanan dan kesempatan terhadap perilaku kecurangan akuntansi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(2), 302–315.
- Geis, G. (2018). White-collar and corporate crime. *Oxford University Press*.
- Ghozali, I., & Purnama, R. D. (2020). Pengaruh kepribadian dark triad terhadap perilaku kecurangan dengan moderasi sistem pengendalian internal. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 21(2), 135–146.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2021). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) (3rd ed.). *SAGE Publications*.
- Harahap, L., & Isgiyarta, J. (2023). Corruption and Fraudulent Activities in Higher Education: A Study of Literature. *Jurnal Manajemen*, 14(1), 217.
<https://doi.org/10.32832/jm-uika.v14i1.11239>
- Hendri, S., & Sari, M. (2022). Budaya organisasi dan pengaruhnya terhadap perilaku kecurangan dalam institusi pendidikan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11(1), 77–89.
- Hidayah, N., & Indrawati, A. (2021). Analisis pengaruh faktor-faktor fraud pentagon terhadap kecurangan laporan keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 9(1), 55–68.

- Hidayat, E. M. (2023). Pengaruh stabilitas keuangan, kondisi industri, dan kolusi terhadap kecurangan laporan keuangan dengan good corporate governance sebagai variabel moderasi. *Journal of Social and Economics Research*, 6(1).
- Howarth, D. (2011). Fraud and the psychology of egoism in decision-making. *Journal of Business Ethics*, 101(1), 115–132.
- Indonesia Corruption Watch. (2022). Tren Penindakan Korupsi di Indonesia. www.antikorupsi.org
- Isu, E. M. F., Sofie, & Lenggogeni. (2023). Pengaruh tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, ego, dan kolusi terhadap kecurangan laporan keuangan. *Jurnal Ekonomi Trisakti*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Julián, M., & Bonavia, T. (2020). Determinants of students' willingness to engage in corruption in an academic setting: An empirical study. *Journal of Academic Ethics*, 18(4), 363–375. <https://doi.org/10.1007/s10805-020-09362-5>
- Julián, M., & Bonavia, T. (2022). Students' perceptions of university corruption in a Spanish public university: A path analysis. *Frontiers in Psychology*, 13. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.842345>
- Kalau, A. A., & Leksair, S. Z. (2020). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi dan Perilaku Tidak Etis terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi pada Perusahaan BUMN di Ambon). *Cita Ekonomi: Jurnal Ekonomi*, 14(2), 101–110.
- Kelley, H. H. (1973). The processes of causal attribution. *American Psychologist*, 28(2), 107–128.
- Lestari, C. D. A., Sujana, E., & Julianto, I. P. (2017). Pengaruh opportunity, pressure, rationalization, dan perilaku tidak etis terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan (Studi Empiris pada Hotel Golden Tulip Essential Denpasar). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2), 1–10.
- Marks, J. T. (2009). Playing offense in a high-risk environment: A sophisticated approach to fighting fraud. Retrieved from <https://www.academia.edu/31698128/>
- Maulina, N. S., & Meini, Z. (2023). Pengaruh Fraud Hexagon terhadap Fraudulent Financial Statement (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017–2021). *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 21(2), 97–111.
- Mulyani, S., & Handayani, D. (2019). Praktik kolusi dalam pengadaan barang dan jasa di sektor publik: Studi kasus pada institusi pendidikan. *Jurnal Akuntansi dan Audit*, 16(1), 45–58.

- Nasution, M. E., & Fitriani, R. (2019). Peran good governance dalam mencegah kecurangan di sektor publik. *Jurnal Akuntansi dan Audit*, 15(2), 120–133.
- Nasution, R. D., & Kurniawan, T. (2018). Strategi organisasi dalam mencegah kecurangan berbasis psikologi individu. *Jurnal Psikologi Sosial*, 7(1), 45–58.
- Nita, N. K. N., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh pengendalian internal, integritas, asimetri informasi dan kapabilitas pada kecurangan akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(3), 1819–1837.
- Noviyanti, P. A., & Adityawarman. (2023). Pengaruh religiusitas, tekanan, kesempatan dan rasionalisasi terhadap tindakan kecurangan (Studi pada Aparatur Sipil Negara di Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang). *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(3).
- Nuraini, R., & Suryanto, T. (2023). Pengaruh Rasionalisasi terhadap Perilaku Fraud dalam Organisasi: Studi pada Lembaga Pendidikan. *Jurnal Akuntansi dan Audit Syariah*, 7(1), 55–68.
- Nurhafifa, Rahmawati, & Ramadhan, A. (2021). External pressure, financial stability dan financial target terhadap kecurangan pada laporan keuangan (Kecurangan pada Bank Umum Persero dan Bank Umum Swasta Nasional pada periode tahun 2021). *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 6(2).
- Nurhidayat, I., & Kusumastuti, R. (2020). Strategi pencegahan fraud melalui penguatan whistleblowing system dan budaya integritas. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 6(2), 115–130.
- Paulhus, D. L., & Williams, K. M. (2002). The dark triad of personality: Narcissism, Machiavellianism, and psychopathy. *Journal of Research in Personality*, 36(6), 556–563. [https://doi.org/10.1016/S0092-6566\(02\)00505-6](https://doi.org/10.1016/S0092-6566(02)00505-6)
- Permana, R. A., & Sari, D. A. (2023). Pengaruh Karakteristik Kepribadian terhadap Kecenderungan Fraud dengan Struktur Pengendalian Internal sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Digital*, 3(1), 45–58.
- Permata, A. D., & Siregar, A. (2020). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi fraud di institusi pendidikan: Perspektif fraud hexagon. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(4), 1–15.
- Pramudita, A. (2013). Analisis Fraud di Sektor Pemerintahan Kota Salatiga. *Accounting Analysis Journal*, 2(1).
- Prasad, M., da Silva, M. B. M., & Nickow, A. (2019). Approaches to corruption: A synthesis of the scholarship. *Studies in Comparative International Development*, 54(1), 96–132. <https://doi.org/10.1007/s12116-018-9275-0>
- Prasetyo, B. A., & Pratiwi, A. R. (2021). Pengaruh tekanan dan pengendalian internal terhadap kecurangan akademik mahasiswa dengan moralitas sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(1), 121–132.

- Priantara, D. (2013). Fraud auditing & investigasi. *Mitra Wacana Media*.
- Pujayani, P. E. I., Sujana, E., & Surya, I. M. (2021). Pengaruh Moralitas Individu, Asimetri Informasi, Efektivitas Pengendalian Internal dan Budaya Organisasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada LPD di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi (JIMAT)*, 12(1), 865–875.
- Pura, R., Kartini, Amiruddin, & Indrijawati, A. (2025). Moderating Role of Individual Morality in Relationship Between Aspects of Fraud Hexagon and Fraudulent Behavior : A Study of Budget User Officials in Indonesian Local Government. *Journal of System and Management Sciences*, 15(2), 175–192.
- Putra, I. M. G. D., & Dewi, N. A. W. T. (2022). Pengaruh Elemen Fraud Hexagon terhadap Kecurangan Akuntansi Pada Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 12(2), 339–353.
- Putri, A. D., & Achmad, T. (2021). Pengaruh karakteristik individu terhadap perilaku fraud dengan pengendalian internal sebagai moderasi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(2), 224–239.
- Rahmawati, D., & Santoso, H. B. (2021). Kolusi dan lemahnya pengawasan sebagai pemicu kecurangan dalam sektor pendidikan. *Jurnal Etika dan Akuntabilitas*, 8(1), 22–34.
- Rachmawati, I., & Handayani, S. (2022). Pengaruh Tekanan, Peluang, dan Rasionalisasi terhadap Kecurangan Laporan Keuangan pada Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 11(6), 123–137.
- Ramadhana, K., Juliantari, S., & Alamsyah, W. (2020). Tren Penindakan Korupsi di Sektor Pendidikan 2015–2019. *Indonesia Corruption Watch*.
- Rizkiawan, M., & Subagio. (2022). Fraud Hexagon and Corporate Governance Analysis on the Potential Fraud in Financial Statements. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8(2), 269–282.
- Saputra, T. (2023). Eks Rektor Unila Divonis 10 Tahun Bui di Kasus Korupsi PMB Jalur Mandiri. *DetikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-6739369/eks-rektor-unila-divonis-10-tahun-bui-di-kasus-korupsi-pmb-jalur-mandiri>
- Sari, E. L., Lestari, R. I., Yogananda, T. Z., & Yulaeli, T. (2023). Pengaruh tekanan eksternal dan rasionalisasi terhadap kecurangan laporan keuangan. *Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Logistik (JUMATI)*, 1(1), 1–13.
- Sari, M., & Subroto, B. (2020). *Kapabilitas Individu dan Fraud: Studi Kasus di Universitas Swasta*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 15(4), 304–318.
- Sari, S. P. (2020). Pengaruh Fraud Diamond bagi Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Desa Kecamatan Sidoarjo). *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 18(1), 41.

- Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Hair, J. F. (2017). Partial least squares structural equation modeling. In *Handbook of Market Research* (pp. 1–40). Springer.
- Shore, C. (2018). How corrupt are universities? Audit culture, fraud prevention, and the Big Four accountancy firms. *Current Anthropology*, 59(S18), S92–S104. <https://doi.org/10.1086/695833>
- Siregar, S., & Fitriani, N. (2022). Analisis faktor individual dan struktural dalam mendorong perilaku fraud di sektor pendidikan tinggi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 11(1), 1–13.
- Siregar, A., & Basri, Y. (2020). Internalisasi nilai dan justifikasi dalam perilaku kecurangan akademik. *Jurnal Psikologi*, 16(3), 180–194.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sudrajat, S., Aditama, F., & Firmansyah, A. (2023). Fraud Hexagon: Detection of Fraud of Financial Report in State-owned Enterprises in Indonesia. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 9(1), 87–102.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Suprpta, E. L., & Padnyawati, K. D. (2021). Pengaruh pengendalian intern kas, financial pressure, kesesuaian kompensasi, dan moralitas individu terhadap kecurangan (fraud) pada LPD di Kecamatan Tampaksiring Gianyar. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 4(2), 248–260.
- Suryandari, N. P. E., Wahyuni, M. A., & Julianto, I. P. (2019). Pengaruh tekanan, kesempatan, rasionalisasi (triangle) dan efektivitas penerapan pengendalian internal terhadap tindak kecurangan (Fraud) (Studi pada LPD Se-Kecamatan Negara). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 10(1).
- Takalamingan, F. S., Harnovinsah, & Lenggogeni. (2022). Pengaruh tunjangan kinerja, budaya organisasi, tekanan, kesempatan dan rasionalisasi terhadap kecurangan (fraud). *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 9(2), 161–188.
- Trubnikova, E. I., & Trubnikov, D. A. (2019). The problem of institutional corruption in the system of higher education. *Higher Education in Russia*, 27(12), 29–38. <https://doi.org/10.31992/0869-3617-2018-27-12-29-38>
- Vousinas, G. L. (2019). Advancing theory of fraud: The S.C.O.R.E. model. *Journal of Financial Crime*, 136(4), 1–18. <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2017-0128>
- Wahyuni, N. (2017). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern, Gaya Kepemimpinan dan Pengembangan Mutu Karyawan terhadap Pencegahan Kecurangan Akuntansi pada PTP Nusantara III (Persero) DLAB1 Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan. Skripsi. *Universitas Sumatera Utara*.
- Weiner, B. (1986). An Attributional Theory of Motivation and Emotion. *Springer-Verlag*.

- Welch, A. (2020). Of worms and woodpeckers: Governance & corruption in East and Southeast Asian higher education. *Studies in Higher Education*, 45(10), 2073–2081. <https://doi.org/10.1080/03075079.2020.1823643>
- Wicaksono, A. P., & Pratiwi, R. D. (2022). Sistem pengendalian internal dan efektivitas pengawasan dalam meminimalisir fraud di perguruan tinggi. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 8(1), 45–58.
- Wijayanti, D., & Hanafi, M. (2018). Pengaruh rasionalisasi terhadap kecurangan. *Jurnal Akuntansi*, 24(1), 45–60.
- Wilantari, N. M., & Ariyanto, D. (2023). Determinan Fraud Hexagon Theory dan Indikasi Financial Statement Fraud. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(1), 87–103.
- Wulandari, R., Mubarak, A., & Irawati, W. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraudulent Financial Reporting dengan Menggunakan Analisis Fraud Pentagon. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(2), 345–360.
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The fraud diamond: Considering the four elements of fraud. *The CPA Journal*, 74(12), 38–42.
- Yasa, I. G. P. N., & Sudana, I. P. (2020). Fraud di Lingkungan Perguruan Tinggi: Analisis dengan Fraud Pentagon. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 150–164.
- Yuliana, S., & Hartono, J. (2021). Rasionalisasi dan fraud di lingkungan kerja: Sebuah studi pada perguruan tinggi negeri. *Jurnal Akuntabilitas*, 15(1), 34–45.
- Zaki, M., & Firdaus, A. (2020). Deteksi fraud berbasis kelemahan pengawasan internal pada sektor pendidikan. *Jurnal Etika dan Integritas*, 6(2), 88–102.